



BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU



Balai Riau

RIAU UTAMA

Akselerasi Kemantapan Jalan di Provinsi Riau

RIAU KHUSUS

UPPKB Mencegah Kerusakan Jalan Lebih Cepat di Provinsi Riau



BPJN Riau



@pupr_jalan_riau



@pupr_jalan_riau



PUPR.jalan.riau



**BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL
RIAU**

Mengucapkan:

**Selamat
Hari Bakti
PUPR**



**PUPR
Sigap
Membangun
Negeri**

Kepala Seksi Preservasi
Jalan dan Jembatan
Irfan Hidayat, ST, MT

Kepala Seksi KPIJ
Darmawi, ST, MT



Kepala Sub Bagian TU
Ir Albed Eko Limbong, ST, MSi, IPM



Kepala BPJN Riau
Ir H T Yuliansyah, MT



Kepala Seksi Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Wella Alrisa Putri Loka, ST, MENG



Editorial

Salam Redaksi

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau yang dikenal dengan Inpres Jalan Daerah (IJD) menjadi tugas yang harus dituntaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program IJD dilaksanakan di semua provinsi di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Riau.

Sejalan dengan digulirkannya program IJD tersebut, Laporan Utama edisi ke-4 majalah *Balai Riau* memaparkan sejumlah program paket IJD yang mampu mengakselerasi kemandirian jalan di Provinsi Riau untuk mendukung akses ke kawasan pertanian, perkebunan, industri, pelabuhan, dan akses menuju destinasi pariwisata di Bumi Lancang Kuning.

Paket-paket IJD dititikberatkan pada perbaikan ataupun preservasi jalan yang menyentuh semua bidang dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Dukungan penuh diberikan oleh pemerintah daerah setempat dan masyarakat sangat menyambut gembira program tersebut. Diharapkan tahun 2024 program itu bisa dilanjutkan untuk hasil yang bagus dengan persiapan yang lebih matang.

Pada rubrik Riau Khusus editorial menyajikan artikel terkait Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk mencegah kerusakan jalan lebih cepat di Provinsi Riau. Selain itu, ada juga artikel terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan verifikasi kegiatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Tahun Anggaran (TA) 2024 di Provinsi Riau.

Ulasan lainnya adalah berbagai laporan kegiatan yang dilaksanakan BPJN Riau, antara lain serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari BPJN Riau kepada Walikota Dumai, pelaksanaan pekerjaan di Ruas Jalan Simpang Batang - Lubuk Gaung, pembangunan Jalan Tol *Bypass* Pekanbaru, usulan pembangunan Bundaran pada *Exit* Tol Ruas Jalan Moh Yamin (Bangkinang), Uji Laik Fungsi Jalan Nasional di Lingkungan BPJN Riau TA 2023, dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di BPJN Riau.

Tak ketinggalan rubrik Profil, Srikandi BPJN Riau, Aneka Berita menarik khas Riau, serta Artikel ilmiah yang disajikan khusus untuk menambah wawasan pembaca.

Selamat membaca...



PENANGGUNG JAWAB

Ir H T Yuliansyah, MT

PEMIMPIN REDAKSI

Ir Albed Eko Limbong, ST, MSi, IPM

REDAKTUR PELAKSANA

Darmawi, ST, MT

Talitha Fully Rahmayanti, ST

SEKRETARIS REDAKSI

- Wella Alrisa Putri Loka, ST, MEng
- Elwin Siahaan, ST, MT
- Nova Mariana Pasaribu, ST

EDITOR

- Ir Herison Menjerang, ST, MT, IPM, ASEAN Eng
- Dicky Erlangga, ST, MSi, IPM
- Alfa Adib Ash Shiddiqi, ST, MSc
- Erni Astuty, SKom
- Ridlo Fatra, ST, MT

ARTISTIK/DESAIN

- Irfan Hidayat, ST, MT
- Ikhlās Ika Putra, ST

FOTOGRAFER

- Mitra Herlinda, SKom
- Roni Iman Tua Turnip, SH
- Wahyu Apriandy

SEKRETARIAT

Winda Wulandari, ST

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Jalan Pepaya No 63 Jadirejo Sukajadi
Pekanbaru

Telp (0761) 7435736

Email: bpjnriau@gmail.com

PENERBIT

PT Lintas Media Infrastruktur
Jakarta Selatan

Daftar Isi

RIAU UTAMA

Akselerasi Kemantapan Jalan di Provinsi Riau 6



RIAU KHUSUS



UPPKB Mencegah Kerusakan Jalan Lebih Cepat di Provinsi Riau 9

Penyelenggaraan SPIP di BPJN Riau, Merintis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 12

Verifikasi Kegiatan Program DAK Bidang Jalan TA 2024 di Provinsi Riau 15



Sosialisasi Zona Integritas di Lingkungan BPJN Riau 18

PROFIL

Irfan Hidayat, ST, MT

Hadir dan Memberikan Manfaat bagi Masyarakat 22



SRIKANDI RIAU

Luh Ayu Chandra Kompiang, ST, MEng



Bekerja Adalah Amanah 25

Hildawati, SE



Membuktikan Mampu Bekerja di PU Meski Bukan Insinyur 27

Vivi Narulita, SE

Menyeimbangkan Antara Pekerjaan dan Keluarga 31



LAPORAN RIAU

Serah Terima Aset
Barang Milik Negara 34



Pembangunan Jalan Tol
Bypass Pekanbaru
di Provinsi Riau 39



Usulan Pembangunan
Bundaran pada Exit Tol
Ruas Jalan Moh Yamin
(Bangkinang) 41



Uji Laik Fungsi Jalan
Nasional di Lingkungan
BPJN Riau TA 2023 45



Penerapan Sistem
Manajemen
Keselamatan Konstruksi
di BPJN Riau 48



ANEKA BERITA

Jembatan Kaca *Skywalk*
Tengku Buwang Asmara 51



Aksi Daerah BPJN Riau
Memperingati
Hari Jalan 2023 53

ARTIKEL

Inklusi Digital untuk
Kesejahteraan ASN
dan Pelayanan Publik
di Ibukota Negara
Nusantara 62



Pengumpulan Data
Profil Memanjang
(Ketidakrataan IRI)
Jalan Nasional
di Provinsi Riau 67



Semarak Hari Bakti
PUPR Ke-78
di BPJN Riau 55

Pemeriksaan
Kinerja Peralatan
Batching Plant dan Mutu
Bahan Campuran Beton 58

Akselerasi Kemantapan Jalan di Provinsi Riau

Penanganan Program Kegiatan IJD akan mendukung kemantapan jalan guna menunjang akselerasi ke kawasan pertanian, perkebunan, industri dan pelabuhan, serta destinasi pariwisata di Provinsi Riau.

Pekanbaru, Balai Riau — Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) Ir T Yuliansyah, MT, menekankan pentingnya tingkat kemantapan Jalan Daerah, baik itu Jalan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas utama selain Jalan Nasional.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau yang dikenal dengan Inpres Jalan Daerah (IJD). “IJD merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemantapan Jalan Daerah, baik Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan tematik dari usulan Pemerintah Daerahnya,” kata Yuliansyah.

Menurut Yuliansyah, program kegiatan IJD di Riau dibagi menjadi 2 *batch* yaitu *Batch* I (1A dan 1B) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 dan *Batch* II pada TA 2024, di mana *Batch* I terdiri dari 12 Paket Fisik dengan alokasi anggaran Rp 367 miliar, dan 3 Paket Pengawasan atau Supervisi.

Peningkatan Jalan
Ukui - Kopau
(PPK 2.3 Provinsi Riau).

BPJN Riau menangani program kegiatan IJD dengan total panjang jalan 63 km yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau (Satker PJN I Riau) dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau (Satker PJN II Riau), di mana PJN I Riau menangani sebanyak 7 paket sepanjang 25 km, sedangkan PJN II Riau menangani sebanyak 5 paket sepanjang 38 km.

“Dalam hal ini merupakan upaya untuk mengakselerasi tingkat kemantapan Jalan Daerah. Karena kalau hanya Jalan Nasional yang mantap, di mana kami melihat Jalan Kabupaten dan Provinsi di Riau trafik lalu lintasnya pun cukup tinggi sehingga seringkali menimbulkan kemacetan,” lanjut Yuliansyah.

“Artinya, Jalan Daerah di Riau benar-benar dimanfaatkan masyarakat, misalnya oleh pemilik kebun sawit untuk mengangkut hasil perkebunannya. Maka program kegiatan IJD di Riau digunakan untuk membuka akses ke kawasan perkebunan dan pertanian, seperti di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Di mana untuk mendukung akses ke kawasan industri dan pelabuhan, seperti Pelabuhan Pelindo di daerah Perawang serta Pelabuhan Lubuk Gaung di Dumai,” ujarnya.

Program kegiatan IJD juga mendukung akses ke destinasi pariwisata Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis. Dan pembangunan infrastruktur jalan yang bagus akan menjadi penunjang rencana

pengembangan kawasan wisata ini. Dari Pekanbaru, Riau, untuk destinasi wisata bisa diakses melalui jalan tol menuju Kota Dumai dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dan dilanjutkan dengan menyeberang menggunakan kapal besar yang bisa mengangkut barang dan jasa atau disebut Kapal Ro-Ro.

Program kegiatan IJD di Riau rata-rata berupa perbaikan atau preservasi jalan, tidak ada pembangunan jalan dan jembatan yang baru. Penanganannya berupa perkerasan rigid pavement dan flexible pavement serta ada penanganan timbunan dilakukan untuk Paket Peningkatan Jalan Simpang Batang - Lubuk Gaung. Di mana paket



Peningkatan Jalan
Teluk Piyai (Kubu) -
Panipahan - Bts. Sumut
(PPK 1.5 Provinsi Riau).



Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar (PPK 2.5 Provinsi Riau).

ini merupakan pembukaan akses ke beberapa pelabuhan swasta yang dibangun oleh perusahaan kelapa sawit dengan cara membuat jalan pintas (shortcut). Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan di dalam kota.

"Progres kegiatan IJD di Riau cukup bagus telah mencapai target sebesar 85 persen atau dengan rata-rata seluruh paket kegiatan IJD telah mencapai di atas 50 persen," kata Yuliansyah di Pekanbaru, Senin (6/11/2023).

"Kontrak Penanganan Paket IJD di Bumi Lancang Kuning semuanya untuk single year atau satu Tahun Anggaran (TA). Pemerintah Daerah (Pemda) Riau akan mengusulkan lagi paket-paket kegiatan IJD di mana mereka menginginkan lanjutan program kegiatan IJD untuk TA 2024. Hal ini terutama untuk usulan yang belum terealisasi pada TA 2023 contohnya



Peningkatan Jalan Simpang Pemda - Pelabuhan Pelindo (PPK 1.3 Provinsi Riau).

untuk penanganan jalan di dalam Kota Pekanbaru yang tidak masuk program kegiatan IJD TA 2023 sehingga banyak terjadi kerusakan jalan di Pekanbaru," jelasnya.

Pelaksanaan program kegiatan IJD di Riau hanya mengalami sedikit kendala saat proses pengadaan lelang lewat e-Katalog untuk mendapatkan pihak penyedia jasa yang berkualitas. Hal tersebut bisa diatasi secara profesional. "Kendala

minim sekali, di mana Pemda setempat sangat membantu menyelesaikan pembebasan lahan yang berkaitan dengan masyarakat," ujar Yuliansyah.

Pada saat pembangunannya telah selesai akan dilakukan serah terima aset jalan hasil kegiatan IJD tersebut kepada Pemda setempat. Pemda diharapkan terus melakukan pemeliharaan jalan yang telah dibangun sehingga akan terjaga terus kemantapan jalannya.

UPPKB Mencegah Kerusakan Jalan Lebih Cepat di Provinsi Riau

Efektivitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) mengontrol beban kendaraan berlebih bisa mencegah kerusakan jalan lebih cepat di Provinsi Riau.

Oleh: Suriyatno

Pekanbaru, Balai Riau — Ada banyak faktor penyebab kerusakan jalan terjadi lebih cepat daripada umur rencana yang seharusnya. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Beberapa faktor internal di antaranya pemrograman penanganan jalan yang tidak tepat, rendahnya

kualitas konstruksi yang dihasilkan, dan penanganan jalan yang masih reaktif (penanganan jalan setelah rusak, bukan pencegahan (preventif). Selain faktor internal tersebut, penyebab kerusakan jalan yang lebih cepat daripada umur rencana yang berasal dari eksternal adalah tidak

terkendalinya beban kendaraan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 26, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa (i) Rambu Lalu Lintas; (ii) Marka Jalan;



Pembangunan Gedung Utama UPPKB Tenayan Raya.



(iii) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; (iv) Alat Penerangan Jalan; (v) Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan; (vi) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan; (vii) Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat; dan (viii) Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan.

Pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan tersebut, perlu dilakukan pengawasan muatan angkutan barang. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan alat penimbangan, dapat berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindahkan. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh pemerintah, atau yang dikenal dengan istilah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).



Jenis kendaraan

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 63 menyatakan bahwa pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap, digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua Mobil Barang kecuali angkutan peti kemas, mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas, angkutan barang berbahaya, dan alat berat.

UPPKB ditempatkan di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional yang lokasinya ditentukan

dengan pertimbangan seperti rencana tata ruang, pusat bangkitan perjalanan, jaringan jalan dan rencana pengembangan, volume lalu lintas harian rata-rata angkutan barang, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, kondisi topografi, efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan, dan ketersediaan lahan. Lokasi UPPKB dapat terletak pada kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, jalan tol dan lokasi strategis lainnya.

UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan, di antaranya tata cara pemuatan barang; dimensi kendaraan

angkutan barang; penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang; persyaratan teknis dan laik jalan; dokumen angkutan barang; kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Fasilitas UPPKB terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang, yaitu pertama Fasilitas Utama yang terdiri dari (a) Fasilitas sebelum penimbangan meliputi jalan akses keluar masuk kendaraan dan jalan sirkulasi di dalam wilayah operasi UPPKB; (b) Bangunan kantor petugas; (c) Landasan penimbangan; (d) Fasilitas sistem informasi penimbangan bermotor yang terdiri dari alat pemindai data identifikasi kendaraan, alat pemindai dimensi kendaraan, rekaman otomatis penimbangan, alat pemindai palang pintu (*barrier gate*), dan program aplikasi yang secara otomatis mengirim data kendaraan berikut sanksinya ke pusat data; (e) Fasilitas pasca-penimbangan meliputi tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, tempat parkir kendaraan, fasilitas pendukung kegiatan operasional, bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan, instalasi listrik, papan/tampilan nama UPPKB, pagar, dan ruang terbuka hijau.

Kedua, Fasilitas Penunjang yang terdiri dari tempat ibadah, toilet umum, kantin, mess petugas, dan empat istirahat pengemudi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terbesar dan Dimensi Kendaraan Bermotor, Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan. Muatan Sumbu



Terberat (MST) dipakai sebagai *Legal Aspect* (Dasar Hukum) pengendalian dan pengawasan muatan kendaraan di jalan dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang jalan mengatur bahwa Jalan Kelas I wajib memenuhi daya dukung dan menerima MST 10 ton, dan Jalan Kelas II dan III wajib memenuhi daya dukung dan menerima MST 8 ton.

Kementerian Perhubungan sebagai Kementerian yang mengatur tentang regulasi Lalu Lintas Angkutan Jalan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang diizinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang diizinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan. Surat Edaran ini dijadikan acuan oleh Kementerian Perhubungan melalui UPPKB yang melakukan penimbangan kendaraan, Penindakan Langsung (tilang), dan penertiban kendaraan yang lewat.

Dampak beban berlebih

Umur pelayanan jalan diperoleh dari perhitungan kumulatif beban sumbu standar ekuivalen (*Cumulative*

Equivalent Standard Axle atau CESA). Umur pelayanan dinyatakan habis saat jumlah lintasan kendaraan mencapai jumlah rencana dalam rentang waktu yang ditentukan dalam perencanaan.

Beban kendaraan yang berlebih merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan jalan lebih cepat rusak sebelum mencapai umur layanannya, sehingga diharapkan UPPKB yang ada di Provinsi Riau dapat berfungsi dengan efektif. Terdapat dua UPPKB yang beroperasi di Provinsi Riau, yaitu UUPKB Balai Raja dan UPPKB Muara Lembu dan satu UPPKB yang berada di Tenayan Raya yang sedang dalam tahap pembangunan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang direncanakan beroperasi pada bulan April 2024.

Beban kendaraan berlebih memang salah satu faktor yang mengakibatkan jalan lebih cepat rusak, tetapi perlu diingat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab kerusakan jalan seperti kesalahan penanganan, kesalahan pemrograman dan perencanaan, kesalahan perancangan, bahkan kualitas konstruksi yang buruk sehingga untuk menjaga jalan nasional di Provinsi Riau tetap dalam kondisi andal setiap saat ada banyak aspek yang perlu diperbaiki.



Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan SPIP di lingkungan BPJN Riau 2023 tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 2023, di Hotel Pangeran Pekanbaru

Penyelenggaraan SPIP di BPJN Riau, Merintis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) diharapkan mampu menciptakan kinerja yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pekanbaru, Balai Riau — Masa depan tata kelola SPIP di tubuh organisasi publik menjadi perhatian besar pemerintah. Regulasi terus diperkuat, pilar organisasi dihadirkan dan difungsikan, implementasinya juga terus dievaluasi dan dibenahi di lapangan. Selain itu, pencapaian tujuannya juga terus didorong dan ditingkatkan, sehingga kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin positif dan berdampak secara luas. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah proses penegakan hukum terhadap sejumlah pelanggaran SPIP yang semakin diintensifkan sebagai wujud komitmen pemerintah mengawal seluruh agenda pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat.

Penerapan SPIP merupakan salah satu amanat yang harus dipenuhi dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Di mana salah satu poin strategisnya bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mengamanahkan agar Manajemen Risiko dalam tatanan SPIP Terintegrasi dikuatkan serta dikembangkan dari level perencanaan, struktur, dan proses serta pencapaian tujuan.

Bertitik tolak dari landasan regulasi, gagasan, dan cita-cita tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat (PUPR) telah mempersiapkan infrastruktur yang mendukung realisasi target yang dicanangkan, termasuk menghadirkan *Grand Design* SPIP Terintegrasi, sistem monitoring penilaian SPIP Terintegrasi, perangkat SDM-SDM SPIP, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Terbitnya Peraturan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemda menjadi momentum penting di Kementerian PUPR. Dalam regulasi tersebut, SPIP tidak hanya menekankan pada SPIP semata, tetapi juga semakin fokus pada Manajemen Risiko (MR) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Bahkan, SPIP versi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 juga menekankan pentingnya pencapaian tujuan organisasi, untuk menunjukkan posisi kematangan SPIP di sebuah Kementerian memang telah berada pada level optimal.

Oleh karena itu, dalam SPIP versi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dihadirkanlah konsep SPIP



Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan SPIP di lingkungan BPJN Riau 2023.



Peserta Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan SPIP.

Terintegrasi, di mana penilaian kualitas SPIP dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian terintegrasi atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang akan dinilai tiap tahunnya dan akan menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi di Kementerian PUPR. Gambaran Umum Penilaian Maturitas Berbasis SPIP Terintegrasi ini diharapkan dapat mengantarkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan proses SPIP Terintegrasi dengan berfokus pada tujuan mendasar, yaitu efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

pengamanan aset negara.

Penilaian SPIP di lingkungan BPJN Riau telah dilaksanakan sejak 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas SPIP tahun 2023, BPJN Riau memperoleh predikat Tumbuh dengan perolehan nilai sebesar 2,62. Ke depan diharapkan pencapaian Maturitas SPIP pada tahun mendatang mendapatkan predikat Berkembang, sehingga seluruh pihak memiliki persepsi yang sama dan dapat terlibat dalam proses mewujudkan budaya sadar SPIP yang akuntabel, objektif, dan komprehensif.

Sejalan telah dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas BPJN Riau menuju WBK, tepatnya pada 9 Februari 2023, maka seluruh pegawai BPJN Riau mulai dari pimpinan puncak hingga level bawah saling bersinergi dengan dilaksanakannya Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan SPIP di lingkungan BPJN Riau 2023 tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 2023, di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Dalam hal ini, BPJN Riau mengundang narasumber yang berkompeten, di antaranya Sugimulyo, SE,Ak,CA,CRMP.CRGP (Koordinator Pengawasan Bidang P3A BPKP Perwakilan Prov. Riau); Swenesia Yohana Aurora, SE (Auditor Muda BPKP Perwakilan Prov. Riau); dan Idra Andayana, SE (Auditor Ahli Madya) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Selain memberikan pemahaman terhadap teknis pelaksanaannya, pihak BPKP juga melakukan pendampingan dalam pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung sekaligus menanamkan nilai-nilai BerAkhlak sebagaimana yang digaungkan oleh pemerintah dan Kementerian PUPR. Ke depannya dengan telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan adanya perubahan ke arah positif bagi BPJN Riau dan berkontribusi buat Kementerian PUPR untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Verifikasi Kegiatan Program DAK Bidang Jalan TA 2024 di Provinsi Riau

Salah satu arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah meningkatkan konektivitas dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian untuk mendukung pencapaian target kemantapan jalan daerah (Provinsi 75% dan Kabupaten/Kota 65%) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Oleh: Darmawi & M Ichsan

Pekanbaru, Balai Riau — DAK Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai

dengan prioritas nasional.

Berdasarkan data Sistem Pengelolaan *Database* Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SiPDJD) tahun 2023, kemantapan Jalan Provinsi 64,94% dan kemantapan jalan Kabupaten/Kota rata-rata 51,98%, kemantapan paling rendah 20,06% (Kabupaten Indragiri Hulu) dan paling tinggi 71,30% (Kota Pekanbaru).

Memperhatikan data tersebut sangat sulit untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 bidang jalan. Dukungan pemerintah pusat melalui DAK infrastruktur bidang jalan dan jembatan ini sangat disambut positif oleh pemerintah daerah, khususnya dinas teknis terkait sebagai salah satu alternatif pembiayaan penanganan jalan daerah di Provinsi Riau.



Peserta Sosialisasi Kegiatan DAK Bidang Jalan TA 2024 dan Pendampingan *Long Segment*.

Sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 total Rincian DAK Fisik Bidang Jalan TA 2024 di Provinsi Riau sebesar Rp 313.598.619.000, dengan jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan DAK Fisik Bidang Jalan TA 2024 sebanyak 12 dari 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau. Hal ini merupakan peningkatan karena pada tahun 2023 hanya 7 pemerintah daerah di Provinsi Riau yang mendapatkan alokasi DAK infrastruktur bidang jalan dengan total sebesar Rp 177.372.881.881. Dengan alokasi yang tersedia pada TA 2024 ini, diharapkan rencana penanganan jalan dan jembatan tepat sasaran sesuai dengan kondisi jalan pada ruas tersebut sehingga dapat menambah kemandirian jalan dan jembatan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), pasal 104 mengamanatkan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau untuk menyelenggarakan fungsi fasilitasi dalam hal penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi data jaringan, dan verifikasi usulan pemograman jalan daerah.

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Nomor PA0103-Sf/368 tanggal 22 Desember



Pembukaan oleh Kepala Seksi KPIJ BPJN Riau.

2023 hal Informasi Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Program DAK Bidang Jalan TA 2024, maka pada tanggal 11-13 Desember 2023 dilakukan Verifikasi Usulan Kegiatan Program DAK Bidang Jalan TA 2024 Provinsi Riau dan Pendampingan Teknis Penanganan Long Segment Jalan di Hotel Labersa, Kampar, Riau.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan verifikasi dalam Konsultasi Program dan Pembahasan RK DAK Fisik Bidang Jalan yaitu verifikasi level provinsi yang dilakukan antara Dinas Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (Balai/P2JN).

Balai/P2JN melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan data teknis maupun administratif terhadap

ruas-ruas yang disetujui dan tertuang dalam Berita Acara Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Bidang Jalan TA 2024, sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan Pendampingan Teknis Penanganan *Long Segment* Jalan dan Desain Perkerasan Jalan pada Lalu Lintas Rendah oleh Bapak Ir Agus Wardono selaku narasumber Direktorat Preservasi Jalan Wilayah I yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Balai/P2JN dan Dinas Pemerintah Daerah mengenai konsep penanganan long segment dan desain perkerasan pada lalu lintas rendah.

Selain itu, juga dilakukan



Paparan narasumber dari PFID.



Paparan dari narasumber Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.



Kabupaten Bengkalis



Kabupaten Indragiri Hilir



Kabupaten Kampar



Kabupaten Indragiri Hulu

pendampingan oleh narasumber Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Ibu Desi Meriana, ST, MT, yang menjelaskan tentang Kebijakan, Evaluasi Indeks Teknis dan Kebijakan Teknis Konsultasi Program DAK 2024, serta Sosialisasi *Immediate Outcome* (Capaian Hasil Jangka Pendek) dan SE Menteri Nomor 17/SE/M/2023. Akhir kegiatan dilanjutkan dengan *Desk* antara Dinas Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (Balai/P2JN) terhadap kesesuaian dan kelengkapan data teknis dan administratif usulan DAK Bidang Jalan TA 2024.



Kabupaten Kepulauan Meranti



Kabupaten Siak



Kota Dumai



Kabupaten Rokan Hulu

Hasil *output* dari kegiatan tersebut diterbitkannya Berita Acara Verifikasi level provinsi yang akan dilanjutkan dengan verifikasi level pusat antara Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah dan Dinas Pemerintah Daerah. Dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau dalam Verifikasi Usulan Kegiatan Program DAK Bidang Jalan TA 2024, diharapkan dapat menghasilkan data dukung usulan DAK TA 2024 yang lengkap dan sesuai dengan NSPK sehingga dapat mencapai sasaran yang direncanakan.



Kabupaten Kuansing



Kabupaten Rokan Hilir



Provinsi Riau



Kabupaten Pelalawan

Sosialisasi Zona Integritas di Lingkungan BPJN Riau

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di BPJN Riau demi mendorong percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR. Evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan agar penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Oleh: Darmawi & Fully Rahmayanti

Pekanbaru, Balai Riau — Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit

kerja untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

BPJN Riau termasuk dalam 14 Balai yang telah melakukan penancangan ZI, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat memberikan bimbingan untuk

tahap selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpedoman kepada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2022.



Kegiatan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Triwulan III di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) diselenggarakan sehubungan dengan Surat Direktur Kepatuhan Intern Nomor OR 03-Bi/489 tanggal 5 Oktober 2023 hal Pemantauan Pemenuhan dan Pelaksanaan Pelaporan Manajemen Risiko Tahun 2023 pada UPR-T2

dan UPR-T3 serta dalam rangka pemenuhan pelaksanaan pelaporan Manajemen Risiko oleh UPR-T2 dan UPR-T3 sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021.

Pembangunan ZI

ZI adalah instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/

WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dasar Pelaksanaan Pembangunan ZI di Kementerian PUPR, di antaranya Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah,

PESAN MENTERI PUPR

“...Penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari **mitigasi risiko penyelenggaraan proyek, upaya pencegahan potensi risiko**, sekaligus pemastian berjalannya proses bisnis Kementerian PUPR, seluruh Insan PUPR agar senantiasa bersiap diri untuk **mengaplikasikan manajemen risiko** pada Unit Organisasinya...”

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ARAHAN MENTERI PUPR

PUPR
SIGAP PEMBANGUN NEGARI

“**Pembangunan ZI dan SMAP merupakan pagar pembatas bagi Insan PUPR** untuk melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu, Insan PUPR harus dapat merenungkan diri dan tidak meloncat dari pagar pembatas yang ada sehingga **bersih dari penyuapan maupun tindak korupsi**.”

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc

Disampaikan pada **Pencanangan Pembangunan ZI**
Ditjen Perumahan, 24 Juni 2022



Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI di Kementerian PUPR, SE Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, dan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022-2024.

Pembangunan ZI bertujuan untuk menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi, efisiensi yang lebih besar, dan mempengaruhi sistem yang lebih luas. Selain itu, ZI juga sekaligus mendorong percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR, Penguatan Ekosistem Integritas, dan Mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi dan melayani.

Manajemen Risiko

Dalam SE Menteri PUPR Nomor 4/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, definisi risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Penyebab risiko adalah peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung/hakiki dari kejadian risiko yang diidentifikasi dapat berupa peristiwa atau keadaan baik berasal dari internal maupun eksternal Unit Pemilik Risiko dan dalam hal penyebab langsung suatu Risiko lebih dari satu, penyebab risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi atau dominasi sebagai penyebab kejadian.

Pelaksanaan Manajemen Risiko bertujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai agar Kementerian PUPR dapat meningkatkan kinerja mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran. Penerapan Manajemen Risiko penting digunakan sebagai alat kendali ketidakpastian dengan mengantisipasi dan mendeteksi



potensi risiko, juga sebagai alat bantu untuk memahami proses bisnis unit organisasi dengan lebih baik.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan pada awal perencanaan pekerjaan dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada seluruh tahapan pekerjaan. Penerapan Manajemen Risiko bermanfaat untuk mempermudah pengambilan keputusan, meminimalisir dampak kerugian, serta secara cepat dan tepat menanggapi perubahan.

BPJN Riau

Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, mulai dari Triwulan I hingga Triwulan III, BPJN Riau selaku UPR-T2 beserta 5 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPJN Riau selaku UPR-T3 telah melaksanakan pemenuhan laporan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan pada SE Menteri PUPR Nomor 4 tahun 2021 serta SOP Mekanisme Pelaporan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2022.

Adapun pemenuhan laporan Manajemen Risiko yang dilaksanakan yaitu Dokumen Manajemen Risiko oleh Tim Pengelola Risiko, Laporan penerapan Manajemen Risiko oleh Tim Pengelola Risiko, dan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko oleh UKI BPJN Riau.

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan pelaporan SAKIP di Lingkungan BPJN Riau yang diselenggarakan untuk mewujudkan tertib pelaporan SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Pada pelaporan SAKIP termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai permasalahan dan tindak lanjut yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu sumber *Loss Event Database* yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam Profil Risiko.

Adapun pemenuhan pelaporan yang termasuk dalam SAKIP, yaitu Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Lembar Kerja Evaluasi/Lembar Hasil Evaluasi (LKE/LHE).

Pada kegiatan tersebut dibahas mengenai Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan yang memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan yang telah ditetapkan di dalam rencana aksi sehingga dapat memantau kemajuan capaian target,

menganalisis serta mencari solusi terhadap deviasi yang ditemukan pada kinerja. Laporan monitoring dan evaluasi bulanan juga terkait dengan Manajemen Risiko, di mana merupakan salah satu hasil dari penerapan Manajemen Risiko.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ZI, Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Triwulan III, serta Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPJN Riau dilaksanakan pada tanggal 2-3 November 2023 dengan narasumber Ibu lin Maghfirotul Jannah, ST, MT, Bapak Arif Frasan Sibuea, ST, dan Bapak Nurrahman Alfian D, ST, yang dihadiri oleh para Pejabat Pengawas, Kepala Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Umum, Petugas SAKIP Satuan Kerja di BPJN Riau.

BPJN Riau telah melakukan pencaangan ZI sejak 9 Februari 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, pembangunan ZI di BPJN Riau segera dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan serta berkomitmen

penuh menuju WBK. Komitmen tersebut perlu dilaksanakan oleh segenap pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan BPJN Riau. Dalam pelaksanaan ZI, BPJN Riau tidak hanya menandatangani pencaangan saja, tetapi berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ZI dengan sebaik-baiknya.

Pemenuhan dokumen Manajemen Risiko di lingkungan BPJN Riau telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tetapi untuk waktu yang akan datang terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan untuk pelaporan yang lebih baik sesuai pedoman yang berlaku, seperti menambahkan risiko *fraud* dalam dokumen Manajemen Risiko di tahun berikutnya, Profil Risiko yang di bawah garis toleransi tidak perlu dimasukkan ke dalam laporan penerapan karena termasuk dalam risiko yang sudah terkendali, menyesuaikan format laporan dengan SOP/UPM/DJBM/159.

Proses Manajemen Risiko dari awal hingga akhir harus melibatkan pemilik risiko dan semua pihak yang berhubungan dengan proses bisnis

di BPJN Riau agar profil risiko yang didapatkan tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga proses pengendalian risiko dapat berjalan dan risiko bisa diatasi dengan baik. Koordinasi dan komunikasi dengan semua *stakeholder* menjadi kunci dari keberhasilan Manajemen Risiko.

Pelaporan SAKIP disesuaikan dengan data e-Monitoring, seperti permasalahan, tindak lanjutnya, serta dokumentasi, berkoordinasi dengan Kepala Satker dan PPK masing-masing paket pekerjaan yang dipantau. Jangan sampai pelaporan yang tertulis tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, jika perlu untuk pemantauan laporan e-Monitoring dan SAKIP dipastikan kembali laporan yang disampaikan ke petugas e-Monitoring telah ditandatangani oleh PPK dengan cap basah sehingga petugas e-Monitoring tidak disalahkan dengan laporan progres yang sudah di-*upload*. Dikarenakan pimpinan kita hanya melihat laporan yang ada di sistem e-Monitoring, laporan diharapkan dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



Laporan Penerapan Manajemen Risiko
Unit Pemilik Risiko T1/T2/T3
Dijeri Bina Marga/
Sesdigen Bina Marga/Direktorat/Sekretariat
BPJT/BPJP/BPJS/Balai Teknik/Satuan Kerja

Nomor : _____
Tanggal : Tanggal/bulan/xxxx

 **DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Disusun berdasarkan kebijakan dan prosedur di lingkungan Balai dan Balai Bina Marga
Ditandatangani oleh Kepala Balai Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Format sesuai dengan SOP No. SOP/UPM/DJBM-159 rev:01
 Dapat diunduh di binamarga.pu.go.id/index.php/nspp

DAFTAR ISI LAPORAN PENERAPAN MR

A. Dasar penyusunan laporan
 B. Maksud dan tujuan
 C. Struktur Organisasi Manajemen Risiko
 D. Penerapan Manajemen Risiko
 E. Kesimpulan
 F. Penutup

DAFTAR TABEL

1. Tabel Pemantauan Inovasi Pengendalian
 2. Tabel Tinjauan atas Risiko Baru atas Masalah yang Belum Teridentifikasi
 3. Tabel Daftar Pemantauan Level Risiko

Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, Irfan Hidayat, ST, MT

Hadir dan Memberikan Manfaat bagi Masyarakat

Bisa menjadi menara air yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya, itulah motivasi sederhana yang mendorong Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, Irfan Hidayat, ST, MT, untuk mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya agar bisa bermanfaat bagi orang lain.

Pekanbaru, Balai Riau — Bagi Irfan, di mana pun kita berada harus mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya dilingkungan pekerjaan untuk selalu *sharing* (berbagi) ilmu dan pengalaman kepada teman-teman untuk capaian pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, baik itu secara progres, target, dan kualitasnya.

Kamis (9/11/2023), Irfan mengatakan, walaupun keberadaannya saat ini di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN) Riau terbilang baru, tetapi ia selalu memiliki target untuk berusaha bisa membantu setiap lini terutama di bagian hulunya. “Saya ini pernah menjadi pelaksana, selama di pelaksanaan itu saya sering membantu dalam desainnya. Makanya, saya masuk ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dengan harapan bisa melengkapi bagian desainnya, sehingga teman-teman di pelaksanaan pun terbantu dan tidak mendapatkan hambatan dalam desainnya,” ujarnya.

“Artinya, bergerak dari hilir ke hulu untuk menyempurnakan suatu kegiatan

yang akan membantu teman-teman dari bagian hilirnya,” lanjut lulusan teknik sipil Institut Teknologi Bandung itu.

Perjalanan karier

Awal ketertarikannya pada bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Irfan karena sesuai dengan jurusan kuliah teknik sipil. Dengan demikian, ia bisa berkontribusi langsung dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selain itu, juga termotivasi dari Sang Ayah yang juga seorang pegawai negeri sipil (PNS) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Berkarier di Kementerian PUPR dimulai sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010. Satu tahun kemudian, ia ditempatkan di BPJN Jayapura sebagai pengawas lapangan (Waslap) di Perbatasan Ruas Jayapura-Abepura-Arso-Senggi. Selanjutnya, di tahun berikutnya menjadi koordinator lapangan (Korlap) dan di tahun ketiganya menjadi asisten

teknik pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Jayapura, Provinsi Papua.

“Setelah itu saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S-2 Jurusan Rekayasa Struktur Jembatan di ITB,” ungkapnya.

Selepas lulus dari pascasarjana, Irfan kembali ke Jayapura dan diberikan amanah menjadi PPK 1.2 pada Satker PJN Wilayah I Jayapura, Provinsi Papua. Disaat itulah ia terlibat langsung dalam proyek pembangunan Jembatan Holtekamp (sekarang Jembatan Youtefa/Merah).

Namun, pada tahun 2020, ia dipidahtugaskan ke BPJN Kepulauan Riau sebagai PPK Perencanaan pada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN), yang fokus pada *Detail Engineering Design* atau DED.

“Nah, sejak Juli tahun 2023, saya pindah ke BPJN Riau menjadi Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan,” kata Irfan.

Baginya, selama 7 tahun bertugas di bagian paling Timur Indonesia tersebut



Kegiatan monitoring dan evaluasi pekerjaan pada ruas jalan PPK 1.3 Provinsi Riau.

banyak hal yang berkesan dalam menangani sejumlah proyek, seperti jalan, jembatan, ataupun longsor. Namun, kata Irfan, pengalaman yang sangat berharga selama di BPJN Jayapura ketika terlibat langsung dalam menangani proyek Jembatan Holtekamp. “Karena tidak gampang menangani proyek besar dan dapat bisa selesai hingga akhir serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Jayapura,” ujar pria kelahiran Pekanbaru tahun 1988 tersebut.

Walaupun saat itu harus jauh dari keluarga. Semangat dalam menuntaskan setiap tugas yang diberikan kepadanya tidak perlu diragukan. Hal itu terbukti dengan penghargaan yang ia dapatkan selama menangani proyek prestisius tersebut sebagai “Pegawai Berprestasi pada Tahun 2018”.

“Saya gembira selama ini keluarga selalu memberikan dukungan terutama istri. Beruntung, istri paham bahwa kondisinya memang seperti itu. Artinya, kita berjauhan, tetapi saat kita jumpa lebihnya adalah *quality time* untuk keluarga,” ungkap Irfan.

Tidak dimungkiri, kendala lingkungan sosial dengan masyarakat selama menjabat sebagai PPK tidaklah mudah, khususnya saat harus berhadapan langsung dengan warga terkait pembebasan lahan. Namun, dari permasalahan tersebut kita jadi banyak belajar dan menimba pengalaman.

Menurutnya, kita menjadi paham bagaimana cara berkoordinasi, mengundang, mengambil hati masyarakat, dan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelesaikannya.

Kendala lainnya ada pada desainernya, yaitu bagaimana caranya kita meng-update suatu standar desain yang baru kepada teman-teman di PPK Perencanaan, karena untuk update standar tersebut terus bergerak lima tahun sekali. Bahkan, ada yang dua tahun sekali. Jadi, kita



Pendampingan Teknis Preservasi: Pemeriksaan Kinerja Peralatan Batching Plant dan Mutu Bahan Campuran Beton.



Kegiatan monitoring dan evaluasi pekerjaan pada ruas jalan PPK 1.3 Provinsi Riau.

”
Karena tidak gampang menangani proyek besar dan dapat bisa selesai hingga akhir serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Jayapura.

harus memastikan dalam hal desain itu sudah sesuai standar yang terbaru.

Di sisi lain, kata Irfan, di bidang preservasi kendalanya kita beririsan dengan tugas dan fungsi (tusi) di pelayanan. Artinya, selain bertugas sebagai pengawasan, juga kita diamanahkan sebagai pelayanan. Hal inilah yang menjadi suatu kendala, di satu sisi target pelayanan harus optimal walaupun kondisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM). “Saya bersyukur, kami tetap bisa mengupayakan untuk membagi tugas, baik itu khusus untuk di pelayanan dan pengawasan. Sederhananya, bekerjalah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga nyaman dan aman,” pungkasnya.

Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, Luh Ayu Chandra Kompiang, ST, MEng

Bekerja Adalah Amanah

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Luh Ayu Chandra Kompiang menerapkan peribahasa itu dengan selalu menjaga amanah terhadap semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dan juga kepada keluarganya kala berperan sebagai seorang ibu di rumah.

Pekanbaru, Balai Riau — Menurut Ayu, pekerjaan adalah amanah. Jadi ia harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ia harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Preservasi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau).

“Bekerja itu amanah yang harus dijalankan. Jangan sampai mendapat gaji buta, tunjangan buta. Walaupun punya tanggung jawab keluarga sebagai istri dan seorang ibu, saya juga punya tanggung jawab di kantor,” katanya.

Pelajaran tentang menjaga amanah ini diperkenalkan oleh orangtua Ayu ketika menentukan jurusan saat kuliah. Saat itu, ia ingin kuliah Kedokteran, tapi ibunya menyarankan agar mengambil jurusan Teknik Sipil. Karena jika Ayu kuliah Kedokteran yang biayanya mahal, lima adiknya akan kesulitan biaya sekolah.

Ia pun harus rela mengalah dan batal kuliah di Kedokteran yang berbiaya mahal demi “menjaga” adiknya agar bisa bersekolah dengan baik. Tanpa gambaran jelas seperti apa Jurusan Teknik Sipil, Ayu membulatkan tekad kuliah Teknik Sipil di Universitas Riau. Apalagi, Teknik Sipil Unri bukan kaleng-kaleng karena memiliki passing grade tertinggi.

Motivasi lainnya yaitu, di keluarga Ayu tidak ada yang menjadi Insinyur. Makanya, menjadi seorang Insinyur bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. “Jadi Bismillah, saya coba,” kenangnya. Akhirnya, ia pun berhak menyandang gelar Sarjana Teknik (ST) setelah lulus kuliah pada tahun 2009. Dan gelar ini ternyata menjadi



bekal dan menentukan kariernya di lingkungan Pekerjaan Umum.

Sempat tergoda untuk meneruskan kuliah S-2 di Institut Teknologi Bandung (ITB) karena ingin menjadi dosen, tapi ternyata Ayu lolos seleksi ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2010. “Akhirnya, saya batal kuliah S-2 karena lulus dan diterima di PU. *Alhamdulillah*, rejekinya di PU saya jalani saja,” ujar Ayu.

Amanah harus dijaga Ayu saat kali pertama bekerja. Sejak awal tahun 2011, ia ditempatkan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan (BBPJN I Medan). Ia ditempatkan di Laboratorium dan diberi tugas oleh atasannya untuk mengurus akreditasi laboratorium yang diterbitkan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ia ditunjuk sebagai Manajer Administrasi Laboratorium. “*Alhamdulillah*, saya berhasil menyelesaikan akreditasi Laboratorium pada tahun 2012,” katanya.

Bertemu jodoh

Mampu menjaga amanah mengantar Ayu mendapatkan tugas belajar dengan kuliah S-2 mulai tahun 2013. Ia mendapatkan tugas belajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Program Studi Sarana dan Prasarana Bahan. Di kampus Bulaksumur inilah,

”

**Bekerja itu amanah
yang harus
dijalankan. Jangan
sampai mendapat
gaji buta, tunjangan
buta.**

Ayu juga bertemu dengan jodohnya yang sama-sama kuliah S-2 di sana. Bahkan, ia dan sang suami yang saat itu menjadi PNS BBPJN VI Makassar memutuskan untuk menikah pada tahun 2014, alias saat belum selesai kuliah S-2. “Biar dapat ijab sah dan ijasah,” kata Ayu bercanda. “Lebih karena sudah waktunya,” lanjutnya.

Bertemu jodoh dan harus menikah saat masih kuliah tak menghalangi langkah Ayu untuk meraih gelar Magister Sarana Teknik (M, Eng) dari UGM setelah lulus S-2 pada tahun 2015. Lalu, ia kembali bertugas di BBPJN I Medan selama setahun. Ia pun mulai mengaplikasikan ilmu yang didapat di tempat di mana mengawali karier dan bekerja sebelum pindah ke Palu, Sulawesi Tengah.

Amanah berikutnya yang harus Ayu tunaikan yaitu saat ditugaskan di BPJN XIV Palu pada tahun 2016-2020. Pada masa itulah, ia mengenang bencana alam gempa dan likuifaksi di Palu pada 2018. Selain sebagai korban bencana alam, ia bersama teman-teman



Sertifikasi Laik Operasi AMP.

BPJN XIV Palu harus tetap bekerja. Mengemban amanah dan tanggung jawab untuk memastikan jalan-jalan bisa dilewati dan infrastruktur bisa digunakan lagi.

Padahal, ia juga harus memikirkan keluarga. “Saat bencana terjadi, saat itu saya masih berada di kantor, sedangkan anak saya yang masih kecil-kecil ada di rumah,” katanya. Perempuan kelahiran tahun 1986

ini pun ikut menjadi bagian dari pemulihan Kota Palu dan sekitarnya pascabencana.

Pada tahun 2020, saat sang suami pindah tugas ke BPJN Kalimantan Tengah, ia harus menentukan langkah untuk ikut pindah. Tapi, oleh Kepala Balai Sulteng, ia disarankan untuk pulang ke Riau. Perempuan berputra 3 (tiga) ini akhirnya memutuskan untuk pulang kampung dan pindah ke BPJN

Riau agar lebih dekat dengan keluarga yang bisa membantunya membesarkan anak-anak. Dan agar ia bisa lebih fokus bekerja. Apalagi, ia merasa punya tanggung jawab besar sebagai PNS.

“Di pekerjaan saya sekarang, semua harus sesuai SK (Surat Keputusan). Jangan sampai tidak menjalankan sesuai tugas dan tanggung jawab. Itulah amanah yang harus saya jaga,” tutup Ayu.



PPSPM pada Satker PJN I Provinsi Riau, Hildawati, SE

Membuktikan Mampu Bekerja di PU Meski Bukan Insinyur

Sempat kurang percaya diri berada di lingkungan Pekerjaan Umum (PU) yang didominasi oleh para insinyur, Hildawati mampu menunjukkan bisa bekerja dengan baik sebagai pegawai berbekal gelar Sarjana Ekonomi.



Pekanbaru, Balai Riau — Hildawati, SE menjadi satu dari beberapa pegawai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tak memiliki gelar insinyur. Kebetulan perempuan yang akrab disapa Hilda ini sejak awal bekerja di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) lebih banyak menangani bidang pembukuan dan keuangan. Ia kini mengemban tugas sebagai Penjabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau.

Hidup adalah pilihan. Senin (6/11/2023), Hilda bercerita awal mula memilih jurusan saat kuliah sampai mendapatkan gelar SE. Padahal, sebenarnya peluang terbuka baginya untuk menjadi Sarjana Teknik bergelar Insinyur saat memulai kuliah. “Saya

tidak mengambil jurusan teknik, karena saya rasa berat (kuliahnya). Tapi, saya tetap yakin bisa masuk dan bekerja di PU meski bukan sebagai insinyur,” katanya.

Hilda masuk kuliah di Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru pada tahun 2021. Ia memutuskan untuk memilih jurusan Ekonomi. Ia tak ingin kuliah membebani hidup dan kariernya jika mengambil jurusan Teknik. Karena tujuan akhirnya masih panjang, yaitu menjadi Pegawai Negari Sipil (PNS). Cita-cita yang juga menjadi harapan orangtuanya.

Almarhum Sang Ayah yang juga pernah bekerja di BPJN Riau, sejak dahulu memang menyarankan dia agar kelak bisa menjadi PNS. Mimpi dan dorongan dari orangtua itulah yang sangat memotivasi Hildawati.

”
Kalau pekerjaan
belum tuntas,
selalu jadi pikiran
saya. Apalagi,
jika menyangkut
pekerjaan yang
harus segera
diselesaikan.



Kebersamaan bersama keluarga.

Sosok Sang Ayah pula yang merekomendasikan sehingga ia bisa masuk di BPJN Riau meski masih berstatus honorer pada tahun 1994.

Perjalanan karier

Selalu fokus dan memberikan yang terbaik, selalu menjadi motto Hilda saat bekerja. Ia tak pernah kendor sejak masuk BPJN Riau pada tahun 1994. Meski ia harus sangat lama bergelut dengan urusan di bagian pembukuan sampai tahun 2007, 13 tahun lamanya. Baru, sejak tahun 2008 Hilda dipercaya sebagai Pemegang Uang Muka (PUM).

Tahun 2011 menjadi penentuan nasib dan masa depan, serta takkan dilupakan dalam perjalanan hidup Hilda. Karena pada tahun itulah penantiannya untuk menjadi PNS berakhir. Ia boleh menyandang status PNS di BPJN Riau. Harapan dan doa orangtua Hilda, terutama sang ayah, akhirnya terjawab.

Saat sudah berstatus PNS, ia masih bertugas sebagai PUM sampai tahun 2015. Setelah itu, ia menjalani peran baru sebagai PPSPM pada Satker PJN I Riau sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Sangat fokus saat bekerja, tak jarang ia harus menunda makan untuk menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Akibatnya, dia beberapa kali terkena sakit asam lambung. "Kalau pekerjaan belum tuntas, selalu jadi pikiran saya. Apalagi, jika menyangkut pekerjaan yang harus segera diselesaikan," ucapnya.

Jerih payah dan kemampuan perempuan kelahiran 1971 ini saat bekerja mulai mendapatkan pengakuan. Ia meraih Penghargaan dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) berupa sertifikat PPSPM Terbaik 1 minim kesalahan se-Riau pada tahun 2021. "Pastinya, ini jadi pengalaman berkesan dan tak terlupakan," katanya.

Di luar bidang pekerjaannya, Hilda pun tak ketinggalan mengukir prestasi

di ajang Hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) yang diperingati pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Harbak PU memang diisi dengan berbagai perlombaan, di antaranya olahraga. Pada Harbak PU 2021, ia mampu meraih medali perunggu atau peringkat 3 di cabang olahraga Bulutangkis nomor ganda campuran se-Riau.

Olahraga, buat Hilda, sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan

serta agar tetap bugar menjalani rutinitas sehari-hari. Karena dengan badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Ia pun makin siap menjalankan aktivitas bersama keluarga dan tentu saja pekerjaan. Kesehatan diakuinya akan mendukung pekerjaan serta berkarier di BPJN Riau. Satu cita-citanya kini yaitu berbagi pengalaman dan pengetahuan bekerja kepada pegawai yang lebih muda sebagai bagian dari proses regenerasi.



Menghabiskan waktu bersama keluarga.

PPSPM pada Satker PJN II Provinsi Riau, Vivi Narulita, SE

Menyeimbangkan Antara Pekerjaan dan Keluarga

Keseimbangan, menjadi prinsip hidup Vivi Narulita. Makanya, ia menjadikan pekerjaan dan keluarga sebagai dua hal penting yang harus ditempatkan dalam porsi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Pekanbaru, Balai Riau — Vivi yang kini dipercaya sebagai Penjabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau (PPSPM pada Satker PJN II Riau) punya prinsip kuat. Ia harus bisa membagi waktu dan menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. “Tiap hari harus ada waktu untuk keluarga,” katanya.

Perempuan kelahiran Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau ini mengaku sangat bersyukur bisa terus menjaga keluarga, terutama anak-anak dan suaminya. Meski ia sibuk sebagai wanita karier di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau).

Vivi selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk keluarga. Karena ia menyadari sebagai PNS, sejak pagi sudah berangkat bekerja dan kadang pulang di waktu petang, atau bahkan malam. Makanya, ia selalu menggunakan waktu yang tersisa secara berkualitas. “Misalnya untuk bercerita dengan anak-anak, dan saya selalu menanyakan kegiatan mereka pada hari itu,” katanya.



Apalagi, tiga putranya masih butuh perhatian darinya sebagai seorang ibu. Vivi juga mengaku wajib terus memantau tiga putranya yang beranjak dewasa. Dua putranya sudah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1). Dan satu putranya lagi masih duduk di bangku SLTA kelas 2. “Jika pekerjaan ada lembur, saya selalu menyempatkan diri untuk menghubungi keluarga, baik melalui telepon atau video call di sela-sela bekerja,” ucapnya, Senin (6/11/2023).

Kedisiplinan juga menjadi kunci untuk mewujudkan keseimbangan hidup ini. Apalagi, ia dibesarkan di lingkungan Bhayangkara karena ayahnya merupakan seorang polisi. Kini, setelah tiga putranya besar dan beranjak dewasa, Vivi memberi



Bersama Kepala Satker beserta ibu-ibu P2JN Provinsi Riau di Tahun 2022.

contoh kepada mereka agar siap untuk mencari pekerjaan, menjadi kepala keluarga dan mendapatkan nafkah.

“Sebagai penyemangat hidup, saya bekerja sekaligus memberikan contoh kepada anak-anak. Karena saya bisa menghasilkan uang dengan bekerja,” tutur perempuan kelahiran tahun 1971 ini.

Di lingkungan Bhayangkara

Dibesarkan di lingkungan Kepolisian, tak salah jika Vivi sempat bercita-cita menjadi Polisi Wanita atau Polwan. Tapi, saat pindah ke Pekanbaru mengikuti dinas ayahnya kala masih duduk di bangku SMA pada 1991, pendirian dan cita-citanya berubah. Saat itu, ia malah mengambil kursus komputer karena masih jarang orang yang bisa komputer. Harapannya, itu bisa menjadi bekal untuk bekerja.

Saat ada lowongan pekerjaan di bidang Pekerjaan Umum (PU), ia pun melamarnya. Apalagi, sang ayah yang seorang polisi mendukungnya dan sangat berharap anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ayah saya sangat mendukung untuk menjadi PNS. Kebetulan saat itu lowongan pekerjaan yang ada di PU,” ujar Vivi.

Dan akhirnya, ia mulai memiti karier di PU. Sejak 1991, Vivi tercatat sebagai karyawan honorer di Bagian Keuangan BPJN Riau. Pada 2007, Vivi memutuskan untuk kuliah di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Saat itu, ia masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Saat kuliah, ia memilih jurusan Ekonomi, bukan Teknik seperti kebanyakan para pegawai di lingkungan PU maupun BPJN Riau. “Otomatis saya mengambil jurusan Keuangan di Fakultas Ekonomi. Saya sudah menggeluti bidang keuangan, maka tinggal melanjutkan saja di jalurnya sejak awal,” katanya.

Dan tak lama saat memulai kuliah, pada 2007 ia diangkat menjadi PNS di Bagian Keuangan. Vivi mengungkap

suka duka saat mulai bekerja, kuliah, dan akhirnya diangkat menjadi PNS. Ia merasakan beratnya menjadi seorang ibu karena harus merawat tiga putranya yang masih kecil-kecil, sambil bekerja.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga. Karena saat saya mulai bekerja, anak-anak masih kecil. Saya bisa melewatinya dengan lulus kuliah, menjadi calon ASN, dan ibu rumah

tangga sekaligus dengan mengurus anak-anak,” ucap Vivi.

Dan yang lebih membahagiakan lagi, kariernya terus menanjak. Pada tahun 2013, Vivi dipercaya untuk menjabat sebagai Pemegang Uang Muka (PUM). Lalu, menjadi Bendahara sejak tahun 2017. Dan terakhir sebagai PPSPM sejak tahun 2023 ini.

Di tengah-tengah kesibukan mengurus keluarga dan pekerjaan, Vivi juga sempat mencatatkan prestasi. Saat masih menjadi Bendahara Satker P2JN, ia mendapatkan penghargaan sebagai Pemberi Laporan Pertanggung Jawaban Terbaik pada tahun 2022. Vivi berharap penghargaan itu terus memotivasinya untuk selalu bekerja dengan baik.

Harapannya dalam karier bisa terus bekerja dengan baik, juga dalam kondisi badan yang sehat. Untuk menjaga kondisi badan agar tetap bugar, ia biasanya berolahraga ringan secara rutin. Setiap pagi antara jam 5.30 sampai 6.00 WIB, ia berjalan kaki di jalanan sekitar rumah.

”
Sebagai
penyemangat
hidup, saya
bekerja sekaligus
memberikan
contoh kepada
anak-anak.



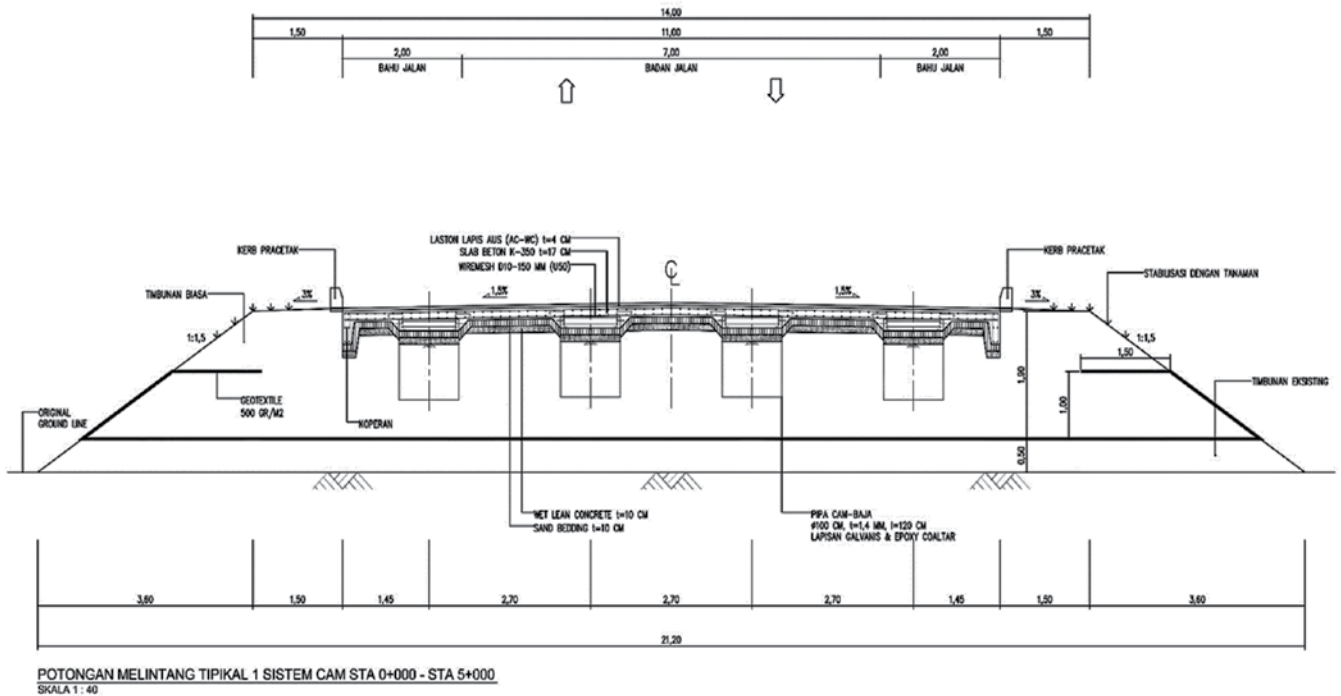
Tim keuangan di tahun 2019.



Kepala Satuan Kerja Wilayah I Provinsi Riau Bersama Walikota Dumai menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pekerjaan Ruas Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung.

Serah Terima Aset Barang Milik Negara

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau), Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau (Kasatker PJN I Riau) serta Walikota Dumai bersepakat melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) Pelaksanaan Pekerjaan di Ruas Jalan Simpang Batang - Lubuk Gaung.

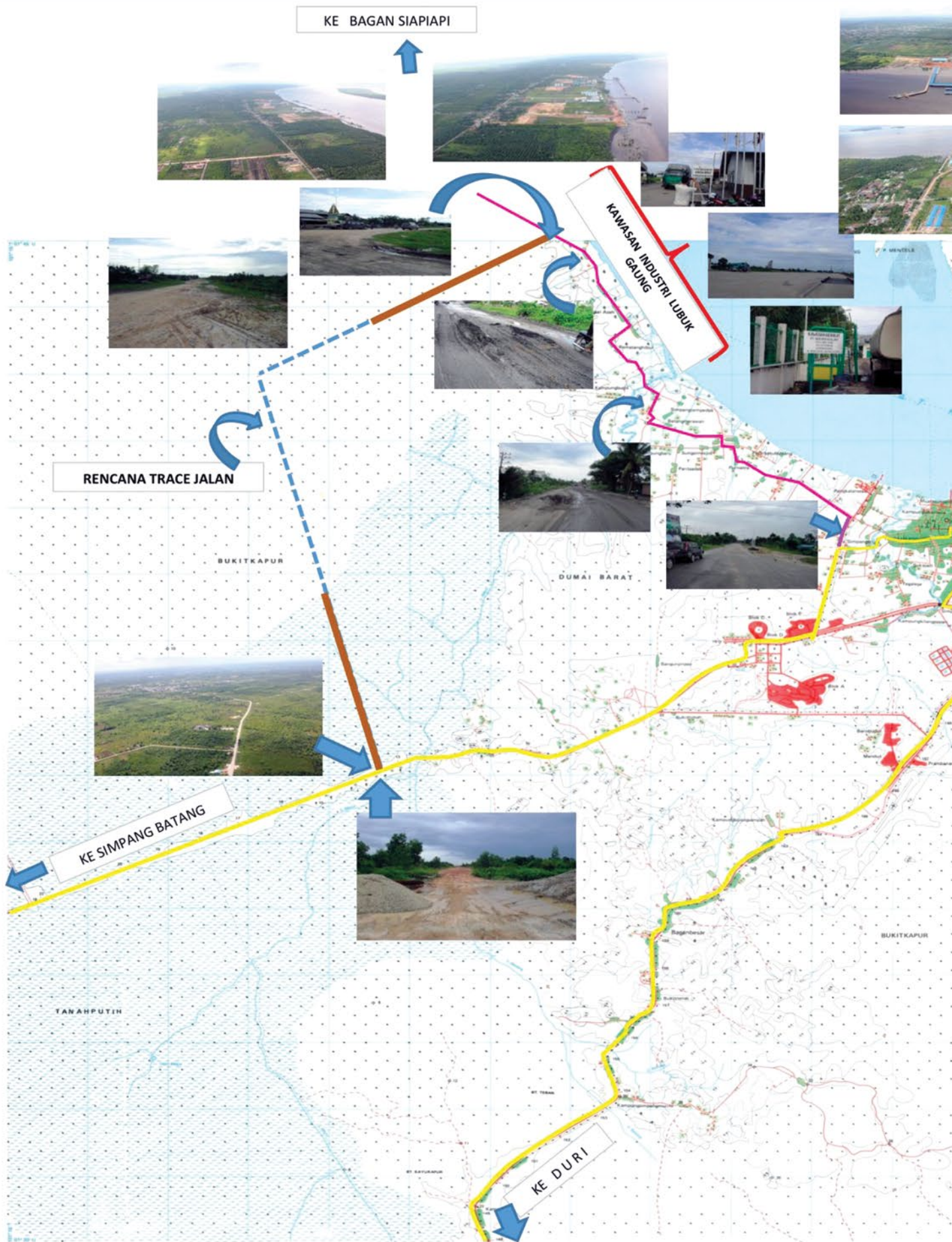


Typical Kontruksi Cakar Ayam Modifikasi (CAM)

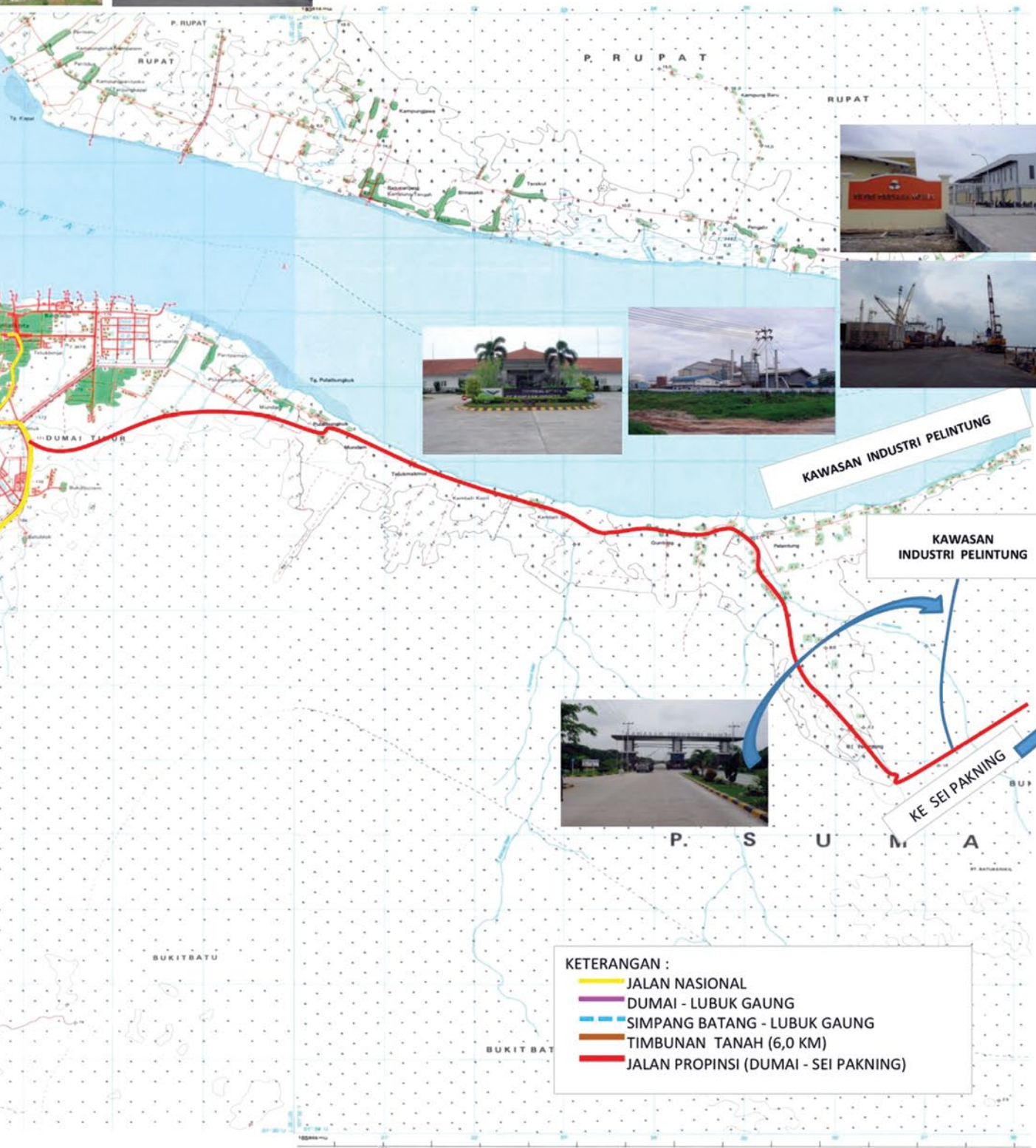
Dumai, Balai Riau — Sehubungan dengan telah terbitnya surat Sekretaris Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 407/KPTS/M/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Dumai, menetapkan hibah BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan dalam renovasi dengan total nilai perolehan sebesar Rp 14.631.705.120,00 kepada Pemerintah Kota Dumai. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR melalui BPJN Riau dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau untuk dapat melaksanakan hibah yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Pemerintah Kota Dumai.

Kepala BPJN Riau, Kasatker PJN I Riau serta Walikota Dumai bersepakat melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juni 2023 di rumah





JARINGAN JALAN KAWASAN MP3EI KAWASAN INDUSTRI DUMAI





Kepala BPJN Riau menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pekerjaan Ruas Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung.

Dinas Walikota Dumai Provinsi Riau. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Naskah Perjanjian Hibah dilakukan oleh Walikota Dumai, Kepala BPJN Riau dan Kasatker PJN I Riau.

Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) dihadiri juga dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Dumai, Bagian Barang Milik Negara di Lingkungan BPJN Riau. Di mana maksud dan tujuan dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) karena telah selesai Pelaksanaan Pekerjaan dan hasilnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Dumai untuk selanjutnya dilakukan penanganan atau pemeliharaan oleh Pemerintah Kota Dumai.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK/06/2016 Tentang Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), setelah dilakukan serah terima Barang Milik Negara, maka pihak yang menerima hibah Barang Milik Negara agar dapat menjaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Adapun Pelaksanaan Pekerjaan di Ruas Jalan Simpang Batang - Lubuk Gaung berstatus bukan Jalan Nasional dengan panjang 21,1 km telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh Direktorat Jenderal Bina Marga di Satker PJN I Riau bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan hasil pendapatan masyarakat dan memajukan Sumber Daya Manusia, juga sebagai alternatif menuju Kawasan Industri Lubuk Gaung (Parit

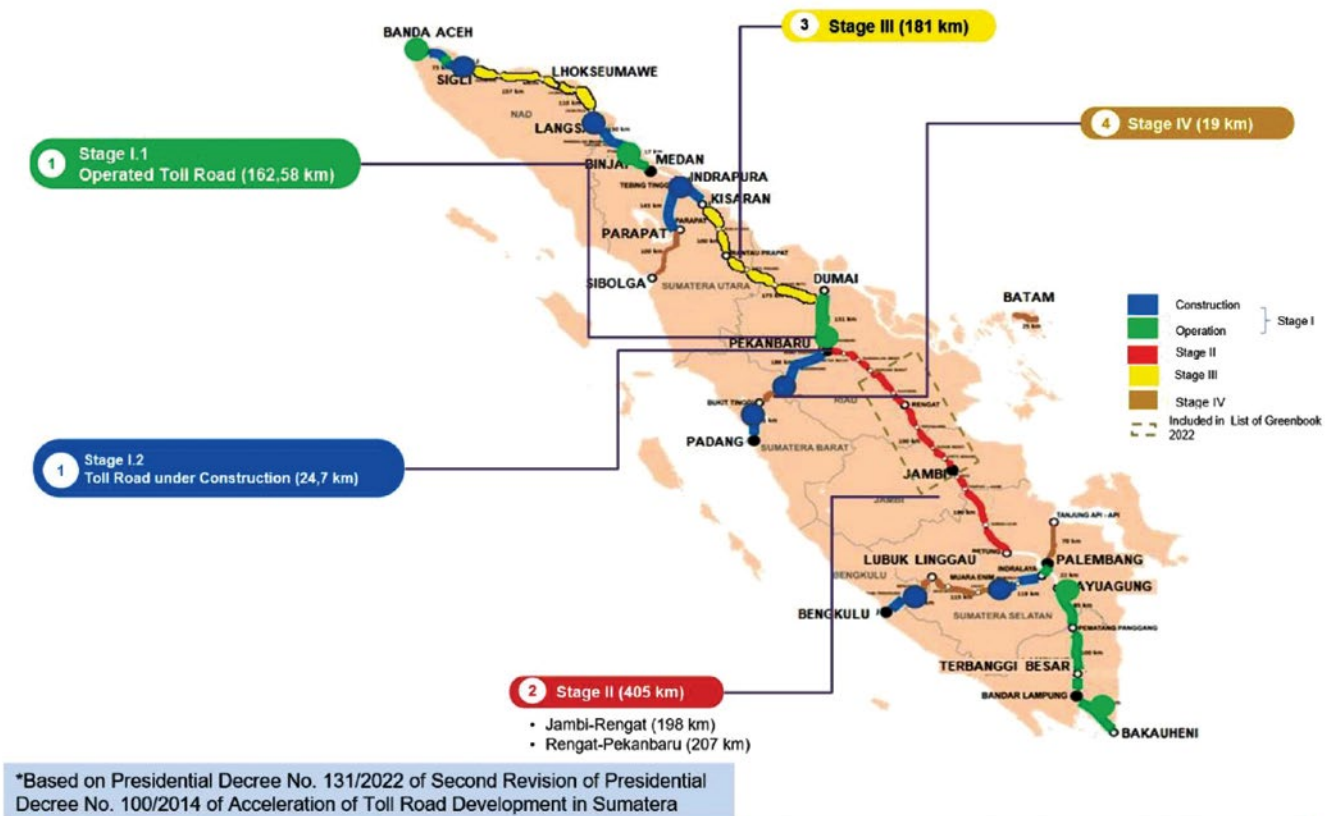
Kitang, Dumai) yang menghubungkan Jalan Provinsi dengan Jalan Nasional yang berada di ruas PPK 1.2 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau. Penanganan sebagai Aksesibilitas Jalan Ekspor dan Impor (kemudahan dalam pelaksanaan dalam hal lain atau transportasi).

Pelaksanaan Pekerjaan di ruas Jalan Simpang Batang – Lubuk Gaung sangat membantu menunjang kegiatan dan perkembangan untuk Kemajuan Daerah Kota Dumai dan masyarakat Dumai. Masyarakat yang berada di sekitar ruas jalan tersebut sangat senang setelah selesai pelaksanaan pekerjaan dan dapat menikmati hasilnya. Sebelumnya untuk mencapai daerah yang dituju bisa memakan waktu yang lama, sekarang sudah begitu cepat perjalanan ke daerah yang dituju, baik untuk pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan.

Pembangunan Jalan Tol *Bypass* Pekanbaru di Provinsi Riau

Jalan Tol *Bypass* Pekanbaru, salah satu segmen dari Jalan Tol Rengat - Pekanbaru, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera. Tol *Bypass* Pekanbaru diperlukan untuk menghubungkan Jalan Tol Pekanbaru - Dumai dan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang.

Oleh: Yulia Fitri



Tahapan Pelaksanaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTTS).

Pekanbaru, Balai Riau — Pembangunan Jalan Tol *Bypass* sepanjang 30,57 km menjadi prioritas Pemerintah Pusat karena dari total panjang 40,00 km ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang yang sudah terbangun, sepanjang 30,70 km sudah

beroperasi. Sisanya sepanjang 9,30 km yang telah terbangun (KM 0+000 - KM 9+300) sejak 26 April 2022, belum dapat dioperasikan karena akses tolnya (*On/Off Ramp*) belum tersedia dan berada pada ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru. Saat ini Jalan Tol

Bypass Pekanbaru masih dalam tahap pembebasan lahan dan masuk tahap II (stage II) dari tahapan pelaksanaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTTS).

Pendanaan

Dalam pelaksanaan Pembangunan

Jalan Tol *Bypass* Pekanbaru, Menteri Keuangan dalam hal pendanaan pembangunan menyatakan dukungannya di dalam surat kepada Menteri PUPR nomor S-794/MK.06/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Keberlanjutan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) Tahap II, bahwa telah terdapat kesiapan pendanaan untuk ruas *bypass* Pekanbaru dan proses pembebasan lahan JTTS *bypass* Pekanbaru dapat segera dilakukan. Dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Presiden RI kepada DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2022, pada tahun 2023, PT Hutama Karya (Persero) juga diusulkan untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 28,9 triliun, yang salah satunya akan digunakan untuk penyelesaian pengerjaan JTTS Tahap II untuk Jalan Tol *Bypass* Pekanbaru.

Ketersediaan lahan

Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau telah menetapkan lokasi (Penlok) melalui Surat Keputusan Nomor 1452/IX/2022 tanggal 29 September 2022 Ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru Seksi IC. Siak - IC *Bypass* Pekanbaru Sta 193+500 - Sta 206+926 di Kota Pekanbaru, dan melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 548/IV/2023 tanggal 11 April 2023, menetapkan lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru Seksi Jc Pekanbaru - IC Siak Sta 176+000 - Sta 193+500 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Bidang Lingkungan Hidup

Dukungan dari sisi readiness criteria bidang lingkungan hidup untuk Pembangunan Tol *Bypass* ini adalah dalam bentuk keluarnya surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang sangat membantu dalam mempercepat pelaksanaan pengadaan lahan. Kementerian LHK dalam Surat Keputusan Nomor SK.1266/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 telah memberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru atas nama Kementerian PUPR seluas + 778 hektar.

Selain itu, Menteri LHK dalam Surat Keputusan nomor SK.1193/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tanggal 9 November 2023 telah menetapkan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Rengat-Pekanbaru atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas 781,472 hektar.

Berdasarkan Surat Menteri LHK tersebut, proses pengadaan tanah pada areal eks kawasan hutan pada lokasi Jc. Pekanbaru (Sta 206+670) - SS. Siak (Sta 193+500) telah dimulai dan ditargetkan tanah bebas 100% pada bulan Maret 2024. Atas nama Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang juga telah menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis

Nasional Nomor PF.01/73-200/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, bahwa Jalan Tol Rengat - Pekanbaru termasuk Segmen *Junction* Pekanbaru (Sta 176+100) - SS. *Bypass* Pekanbaru (Sta 206+670). Saat ini progres tanah bebas untuk Jc. Pekanbaru - SS. *Bypass* Pekanbaru (Jalan Tol Lingkar Pekanbaru) sudah mencapai 0,12% secara persentase Bidang atau 0,4% secara persentase Luasan. Pembayaran Uang Ganti Kerugian telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru untuk 4 bidang senilai Rp 4.552.137.293 dari estimasi kebutuhan sebanyak 988 bidang Rp 371.548.457.546.

Dukungan pembangunan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) memberikan dukungan terhadap pembangunan dari segi pengawasan, koordinasi dan evaluasi, baik dengan Direktorat Jalan Bebas Hambatan maupun dengan *stakeholder* terkait.

Seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 107 (3), yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam hal ini Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan melakukan pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan tol dan melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol.



Usulan Pembangunan Bundaran pada *Exit* Tol Ruas Jalan Moh Yamin (Bangkinang)

Pembangunan bundaran pada *Exit* Tol Ruas Jalan Moh Yamin (Bangkinang) bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan pada persimpangan Jalan Bangkinang - Petapahan dan Jalan Moh Yamin.

Oleh: Darmawi



Bundaran pada *Exit* Tol Ruas Jalan Moh Yamin (Bangkinang)



Arah Lalu Lintas dari *Exit* Tol mengarah ke Provinsi Sumatera Barat.

Kampar, Balai Riau — Pembangunan Bundaran Pada *Exit* Tol Ruas Jalan Moh Yamin (Bangkinang) diinisiasi pada Rapat Koordinasi bersama Bupati Kampar, Anggota Komisi V DPR RI dan perangkat daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan surat Bupati Kampar Nomor 050.13/Bappeda-IV.1/2022/463 perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan *Interchange* (IC) Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang-Pangkalan yang berada di jalan Bangkinang - Petapahan Kabupaten Kampar pada 12 Mei 2021.

Rapat koordinasi dilakukan terkait kemacetan yang terjadi pada saat percobaan *open traffic* jalur mudik lebaran Ruas Tol Pekanbaru-Bangkinang. Kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Bangkinang - Petapahan sepanjang $\pm 5,5$ km akibat dari kondisi perkerasan serta kapasitas jalan yang tidak cukup untuk menampung volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Selain itu, juga terdapat kondisi Jembatan Bangkinang milik



Jalan Moh Yamin (Bangkinang)

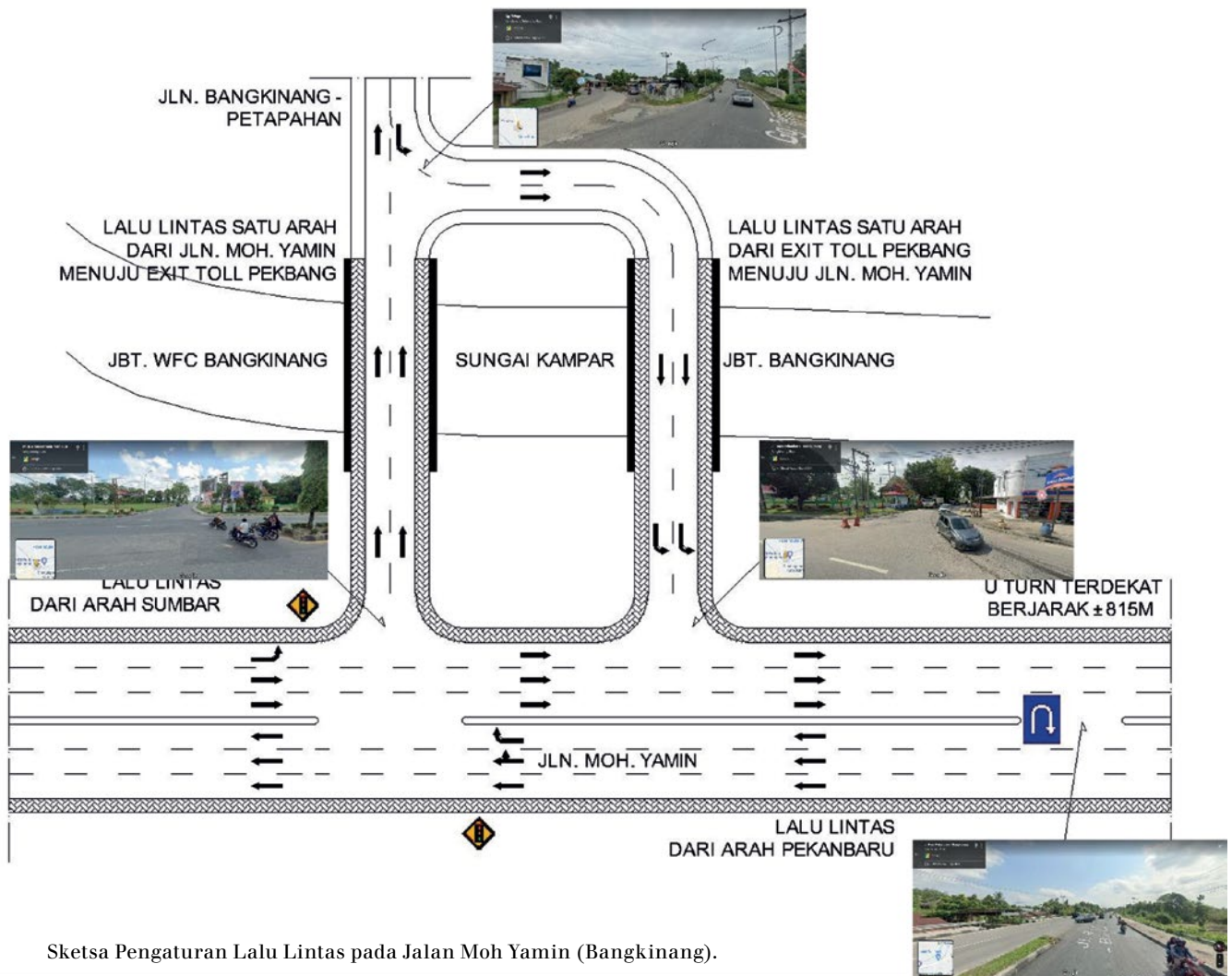
provinsi yang kondisi lantainya rusak, sehingga berbahaya untuk pengguna jalan.

Lalu lintas yang memasuki Jalan Nasional Moh Yamin (Kota Bangkinang) dan mengarah ke Provinsi Sumatera Barat harus berputar sejauh ± 815 meter dari persimpangan jalan provinsi dan nasional juga menyebabkan kemacetan di lokasi tersebut.

Hasil rapat koordinasi terkait persimpangan Ruas Jalan Bangkinang-Petapahan dan Jalan Moh Yamin (Bangkinang), diusulkan pembangunan bundaran yang akan dilakukan kajian terlebih dahulu oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Riau dan Kepulauan Riau, serta Kementerian Perhubungan, sebelum ditindaklanjuti pelaksanaan fisiknya



Kondisi Persimpangan dan *U-turn* (jalan memutar) pada Jalan Moh Yamin (Bangkinang).



Sketsa Pengaturan Lalu Lintas pada Jalan Moh Yamin (Bangkinang).

oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau). BPJN Riau selaku penyelenggara jalan nasional di Provinsi Riau juga perlu melakukan analisa dan mengusulkan alternatif rekayasa lalu lintas yang diperlukan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pada saat arus lalu lintas memasuki Jalan Nasional Jalan Moh Yamin (Bangkinang).

Salah satu IC Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang - Pangkalan berada di Kota Bangkinang tepatnya di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Kendaraan yang keluar dari *Exit* Tol dan mengarah ke Kota Bangkinang akan melewati jalan provinsi, yaitu Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan sepanjang $\pm 5,5$ km dan menuju Ruas

Jalan Nasional Jalan Moh Yamin (Kota Bangkinang).

Rekayasa lalu lintas yang selama ini dilakukan, yaitu arus lalu lintas dari *Exit* Tol menuju Bangkinang akan melewati Jembatan Bangkinang akan bertemu di Jalan Moh Yamin (Kota Bangkinang). Kendaraan yang mengarah ke Provinsi Sumatera Barat harus berputar sejauh ± 815 meter dari persimpangan, radius putar pada *U-turn* (jalan memutar) tersebut tidak memadai, khususnya untuk kendaraan jenis truk sehingga menyebabkan kemacetan. Kendaraan dari Bangkinang yang mengarah ke *Exit* Tol akan melewati Jembatan *Waterfront City* Bangkinang dan akan bertemu kembali dengan ruas jalan Provinsi Bangkinang - Petapahan.

Rekayasa Lalu Lintas

Alternatif rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang keluar dari *Exit* Tol menuju Jalan Moh Yamin (Bangkinang), yaitu sebagai berikut:

1. Mengarahkan arus lalu lintas dari *Exit* Tol dan Jalan Provinsi Bangkinang - Petapahan menuju Jalan Moh Yamin (Bangkinang) menjadi dua arah, yaitu yang mengarah ke Pekanbaru akan melewati Jembatan Bangkinang dan yang mengarah ke Provinsi Sumatera Barat akan melewati Jembatan *Waterfront City* Bangkinang.
2. Arah lalu lintas yang menuju ke Pekanbaru melewati Jembatan

Bangkinang akan langsung bertemu dengan Jalan Moh Yamin (Bangkinang) dan berbelok ke kiri tanpa pengaturan APILL.

3. Arah lalu lintas yang menuju ke Provinsi Sumatera Barat melewati Jembatan *Waterfront City* akan diatur oleh APILL pada persimpangan Jalan Moh Yamin (Bangkinang) sebelum berbelok ke kanan.
4. Penambahan rambu penunjuk arah dan rambu perintah di persimpangan Jembatan Bangkinang dan Jembatan *Waterfront City*.
5. Melakukan pelebaran pada kaki persimpangan jalan provinsi Bangkinang - Petapahan dan Jalan Moh Yamin (Bangkinang) agar dapat menampung volume

No.	Komponen	Tersedia	Belum Tersedia
1	FS	Tidak diperlukan	-
2	DED	-	Belum tersedia dan menunggu kajian teknis BPTD Wii. IV Riau dan Kepri
3	AMDAL	Tersedia	-
4	LAHAN	-	Belum tersedia

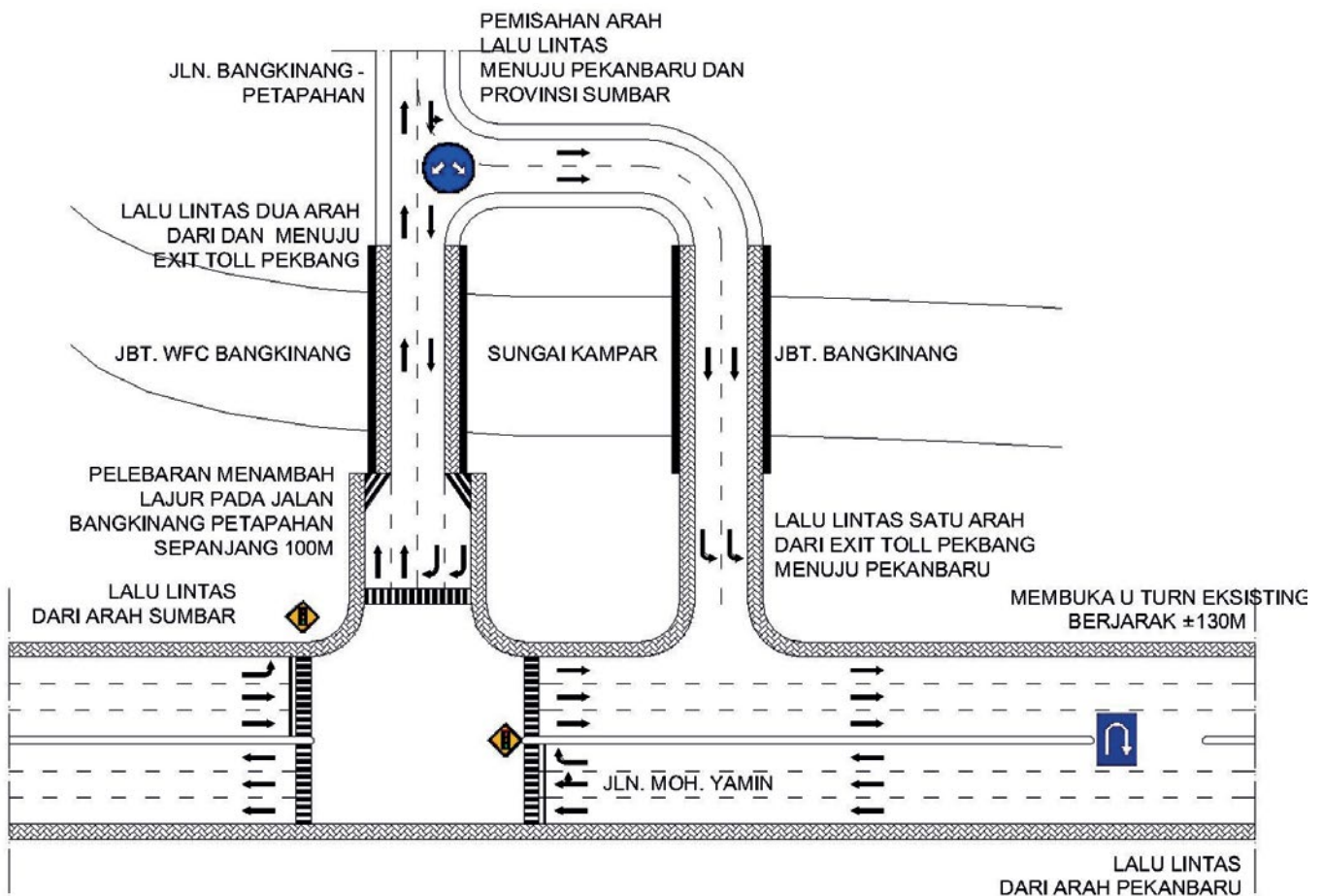
Readiness Criteria (RC) untuk usulan pembangunan bundaran pada *Exit* Tol Ruas Jalan Moh Yamin (Bangkinang).

kendaraan saat berhenti pada pengaturan APILL dan menghindari kendaraan berhenti di atas Jembatan *Waterfront City*.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kemacetan yaitu kondisi perkerasan serta kapasitas jalan provinsi Bangkinang - Petapahan tidak cukup untuk menampung volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jarak *U-turn* dengan persimpangan jalan provinsi Bangkinang - Petapahan dan jalan nasional Moh Yamin

(Bangkinang) cukup jauh ± 815 meter serta radius putar yang tidak memadai, khususnya untuk kendaraan jenis truk.

Usulan Pembangunan Bundaran pada *Exit* Tol Ruas Jalan Moh Yamin (Bangkinang) belum memenuhi kesiapan *Readiness Criteria (RC)*. Rekayasa Lalu Lintas dan pelebaran kaki simpang dapat dilakukan sebagai alternatif jangka panjang untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pada persimpangan Jalan Bangkinang-Petapahan dan Jalan Moh Yamin (Bangkinang).



Sketsa Alternatif Pengaturan Lalu Lintas Pada Jalan Moh Yamin (Bangkinang).

Uji Laik Fungsi Jalan Nasional di Lingkungan BPJN Riau TA 2023

Untuk menciptakan jalan yang memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan serta adanya kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan maka dibutuhkan adanya pelaksanaan uji laik fungsi jalan di mana terdapat pemeriksaan teknis dan pemeriksaan administratif suatu ruas jalan.

Oleh: Arief Rijaldo Fajri

Pekanbaru, Balai Riau — Keselamatan lalu lintas merupakan salah satu isu strategis di mana untuk Kondisi Nasional menunjukkan angka fatalitas akibat kecelakaan lalu

lintas di Indonesia rata-rata per tahun mencapai 27 ribu jiwa (setara 3-4 orang meninggal per jam). Data tersebut juga menunjukkan sekitar 80% korban kecelakaan lalu lintas merupakan

usia produktif (15-60 tahun) sehingga berdampak meningkatkan kemiskinan di mana kerugian ekonomi Indonesia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai Rp 460 triliun (3,1% PDB).



Sambutan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau pada Bimbingan Teknis ULFJ 2023.



Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan bersama dengan Unsur Penyelenggara LLAJ.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi dampak dari permasalahan di atas melalui Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Salah satu pilar keselamatan RUNK LLAJ adalah penyediaan Jalan yang Berkeselamatan (*safer roads*) yang merupakan tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam rangka menciptakan Jalan yang Berkeselamatan, Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Uji Laik Fungsi Jalan serta Pedoman No 11/P/BM/2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Laik

”
**Penyelenggaraan
 kegiatan
 Pendampingan
 Teknis Uji Laik
 Fungsi Jalan di
 BPJN Riau ini
 ditargetkan dapat
 meningkatkan
 kompetensi peserta
 secara umum.**

Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang. Pemeringkatan Bintang adalah penilaian secara objektif dari kemungkinan dan tingkat fatalitas (tingkat keparahan) terjadinya kecelakaan di jalan, di mana semakin tinggi kategori bintang maka jalan tersebut lebih berkeselamatan (*safer roads*). Adapun metode pemeringkatan bintang ini mengadopsi pedoman pemeringkatan bintang dengan pendekatan asesmen The International Road Assessment Programme (iRAP).

Uji Laik Fungsi Jalan merupakan salah satu Tugas dan Fungsi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tak terkecuali BPJN Riau. Pada T.A. 2023 ini, BPJN Riau telah melaksanakan Sosialisasi Bimbingan Teknis Uji Laik

Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang pada tanggal 10-12 Oktober 2023 bersama dengan Sub Direktorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan di bawah Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau menyampaikan dalam sambutannya bahwa "Penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Teknis Uji Laik Fungsi Jalan di BPJN Riau ini ditargetkan dapat meningkatkan kompetensi peserta secara umum, dan secara khusus *men-trigger* manajer ruas untuk *aware* dengan rating keselamatan pada ruas jalannya serta membangun sinergi yang positif antar-instansi yang terlibat secara yuridis dalam pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) di ruas Jalan Nasional Riau," ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) Ir T Yuliansyah, MT.

Dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, turut serta hadir Kepala Sub Direktorat KKJJ Dian Asri Moelyani, ST, MSc sebagai salah satu narasumber, di mana narasumber lainnya juga berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Muhammad Rizki Pratomo, ST dan Dr, Drs Muhammad Idris, MT.

Pelaksanaan uji laik fungsi jalan ini melibatkan beberapa pihak terkait, di antaranya Kementerian PUPR selaku Unsur Penyelenggara Jalan serta pihak Kepolisian dan Kementerian Perhubungan yang diwakilkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat selaku Unsur Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun persyaratan tim uji laik fungsi jalan harus memiliki surat keterangan telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/2023 dan surat keterangan tersebut diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga atau penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Jika belum memiliki surat keterangan, maka harus memiliki



disiplin keilmuan bidang teknik jalan yang dibuktikan dengan ijazah.

Dalam pelaksanaan uji laik fungsi jalan terdapat pemeriksaan teknis dan pemeriksaan administratif. Pemeriksaan teknis dilakukan dengan cara peninjauan langsung serta pengisian formulir pemeriksaan teknis ke ruas yang akan diuji laik fungsi.

Untuk pemeriksaan administratif dilaksanakan dengan memeriksa dokumen - dokumen terkait ruas yang akan dilakukan uji laik fungsi. Adapun dalam kegiatan bimbingan teknis Uji Laik Fungsi Jalan, BPJN Riau melaksanakan uji laik fungsi pada Ruas HR Subrantas - Batas Kabupaten Kampar (Pekanbaru) yang berada di wilayah PPK 1.4.

Ruas Subrantas - Batas Kabupaten Kampar memiliki total panjang segmen penilaian sepanjang 3.000 meter (dua arah terbagi) dan memperoleh bintang ruas jalan sebanyak 3 bintang dengan skor pemeringkatan bintang (SRS) 8,56. Secara umum kondisi ruas jalan Subrantas sudah cukup baik dengan jenis perkerasan kaku, akan tetapi masih memiliki kekurangan pada marka jalan serta rambu-rambu yang kurang lengkap dan ukurannya belum sesuai spesifikasi pada saat dilaksanakan uji laik fungsi jalan pada Oktober 2023.

Selanjutnya, pada bulan November 2023, BPJN Riau melaksanakan uji laik fungsi jalan pada Ruas KPBU-AP yang terdiri atas Ruas Sp. Kayu Ara - Batas Kabupaten Pelalawan (3,42 km), Ruas Batas Kabupaten Pelalawan - Sei Kijang Mati (8,64 km), dan Ruas Sei Kijang Mati - Sp. Lago (30,79 km). Proses pemeriksaan teknis membutuhkan waktu sekitar 1 minggu dengan melaksanakan pengisian formulir langsung di lapangan ke ruas yang dinilai. Untuk nilai skor pemeringkatan bintang masih dalam proses pengolahan sampai pada saat artikel ini diterbitkan.

Dengan adanya pelaksanaan uji laik fungsi jalan ini, diharapkan dapat menurunkan indeks fatalitas atau keparahan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu Sasaran Pilar Jalan yang Berkeselamatan yaitu pada tahun 2030, lebih dari 75% kendaraan bermotor melakukan perjalanan di jalan eksisting yang telah memenuhi standar pemeringkatan jalan bintang 3.



Pemeriksaan kelengkapan dokumen SMKK pada paket pekerjaan di BPJN Riau.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di BPJN Riau

Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi yang kompeten dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dapat mencegah, mengurangi angka kecelakaan kerja di proyek-proyek konstruksi dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif.

Oleh: Hafizah Oktari

Pekanbaru, Balai Riau — Keberlanjutan dan kualitas pembangunan infrastruktur tentunya harus didukung dengan aspek keselamatan proses konstruksi yang matang dan mumpuni. Dampak serius dari kecelakaan kerja di antaranya adanya korban jiwa, kerugian material, pencemaran lingkungan dan

menurunnya produktivitas. Hal tersebut mendorong pemerintah melakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal. Pemerintah turut bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dan untuk itu diperlukan SDM yang kompeten untuk

menciptakan sistem manajemen keselamatan konstruksi di dunia kerja yang biasanya terjadi karena kelalaian dan pelanggaran peraturan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) merupakan Unit Pelaksana Teknis sekaligus representatif Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur Jalan dan Jembatan Nasional di Provinsi Riau. Di antara tugas dan fungsi penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut adalah pengendalian penerapan SMKK dan lingkungan ini melekat pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Serta Seksi Preservasi BPJN Riau. Oleh karena itu, pada Juli 2023, diadakan Pendampingan Teknis Penerapan SMKK di Lingkungan BPJN Riau. SMKK adalah *tools* berbentuk sistem untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi, di mana keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (4K). Pemenuhan

standar 4K tersebut menjamin bahwa konstruksi yang dibangun atau direhabilitasi/dipreservasi memenuhi standar keamanan (*safety factor*) artinya bangunan konstruksi selamat secara keteknikan serta memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja untuk publik maupun lingkungan di sekitar area kerja.

Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman SMKK.

Sebagai salah satu bentuk pengendalian penerapan pelaksanaan SMKK di BPJN Riau, dilaksanakan kegiatan pendampingan teknis terkait kebijakan SMKK dan dilanjutkan dengan penilaian. Kegiatan penilaian tersebut merupakan yang pertama

kalinya diadakan secara internal di lingkungan BPJN Riau. Ke depan, SMKK tidak lagi dianggap sebagai “formalitas”, tetapi pengguna dan penyedia jasa, khususnya di lingkungan BPJN Riau mengetahui pentingnya dan paham terkait SMKK. Mindset selama ini SMKK hanya dikaitkan dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK). Padahal, terdapat unsur 4K pada setiap tahapan konstruksi dimulai dari pengkajian dan perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan, termasuk tahap operasional dan pemeliharaan.

Acara Pendampingan Teknis dan Penilaian Penerapan SMKK di BPJN Riau tersebut dimaksudkan untuk memberi pola pikir yang lebih luas terkait SMKK agar ke depannya SDM yang melakukan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan SMKK memiliki kompetensi untuk melakukan tugasnya, serta direncanakan akan dilaksanakan sertifikasi khususnya untuk SDM yang terlibat langsung dalam pengendalian dan pengawasan SMKK.

Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilaksanakan kunjungan lapangan, sehingga teori yang didapat bisa langsung diterapkan dan dipraktekkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menampung aspirasi dan masukan dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa terkait kendala yang mereka hadapi dalam upaya penerapan SMKK secara optimal.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghindari risiko keselamatan konstruksi yaitu besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi sehingga sangat diperlukan



Kunjungan lapangan penerapan SMKK ke Jembatan S. Zamzam Lama. Kunjungan lapangan pada Proyek *Skyway* Tengku Buwang Asmara di Kabupaten Siak (foto bawah).

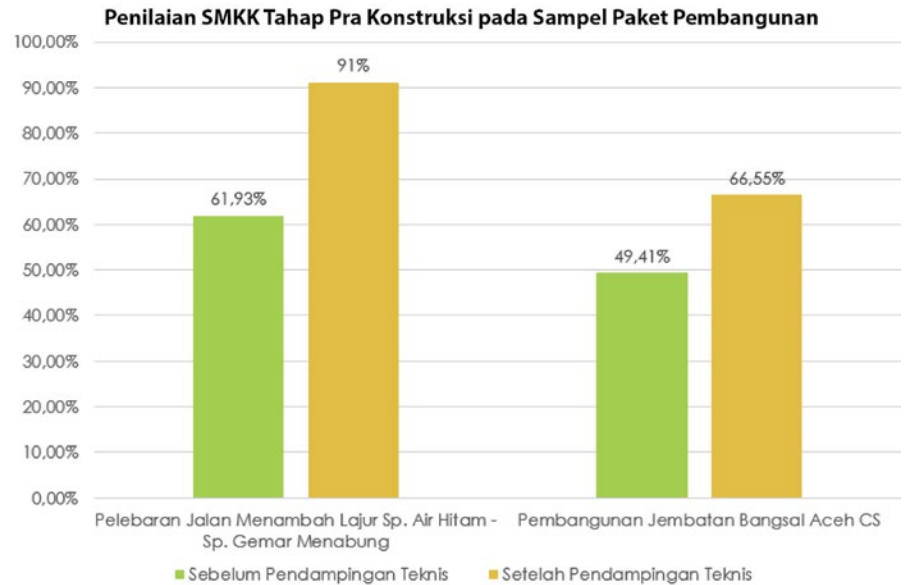


pemahaman dan kelengkapan dokumen terkait. Pada kegiatan ini dijelaskan pemahaman keselamatan konstruksi sesuai perundangan dan dilakukan uji petik pemeriksaan dokumen SMKK, SML, dan ATJ guna melihat kelengkapan dokumen pada 19 paket, yang terdiri dari 3 paket pembangunan dan 16 paket preservasi. Dari 19 paket ini, diambil sampel 3 paket pekerjaan jalan untuk dilaporkan ke Direktorat Pembangunan Jalan, yaitu paket pekerjaan Preservasi Jalan Batas Prov. Sumut - Simpang Batang (PPK 1.1); Penggantian Jembatan S. Zamzam Lama CS (PPK 1.3); dan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Sp. Air Hitam Sp. Gemar Menabung (PPK 1.4).

Kunjungan lapangan dilakukan pada Paket Penggantian Jembatan S. Zamzam Lama CS pada ruas PPK 1.3 didampingi narasumber dari Direktorat Pembangunan Jalan dan Perhimpunan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI).

Para peserta dengan total 90 orang beserta panitia 13 orang, dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1 dan 2 melakukan pengecekan terhadap hal-hal terkait SMKK, SML, dan ATJ yang sudah dilaksanakan pada paket pekerjaan tersebut. Sedangkan kelompok 2 dan 4 melakukan pengecekan terhadap hal-hal terkait SMKK, SML, dan ATJ yang belum dilaksanakan pada paket pekerjaan tersebut. Setelahnya hasil kunjungan tersebut dipaparkan pada hari ketiga kegiatan dan narasumber memberikan *feedback* serta rekomendasi terkait hal yang perlu ditingkatkan dalam penerapan SMKK.

Masih terkait SMKK, pada tanggal 5-7 September 2023, Direktorat Pembangunan Jalan melakukan Pemantauan dan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan SMKK di BPJN Riau. Pemantauan dan penilaian dilakukan pada paket yang menjadi sampel, yaitu Paket Pelebaran Jalan Menambah



Penilaian penerapan SMKK sebelum dan sesudah pendampingan teknis.

Lajur Sp. Air Hitam - Sp. Gemar Menabung pada ruas PPK 1.4 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau.

Kegiatan tersebut untuk memastikan terpenuhinya kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku dan memastikan tercapainya mutu pekerjaan konstruksi dan keselamatan konstruksi yang mencakup unsur 4K, melakukan pembinaan terhadap unsur BPJN Riau, Satuan Kerja, dan para PPK sebagai pengguna jasa, serta pekerja konstruksi penyedia jasa khususnya kontraktor pelaksana, konsultan supervisi dan konsultan perencana dalam penerapan dokumen SMKK, SML, dan ATJ pekerjaan di lapangan, serta dapat mengevaluasi hasil penilaian secara mandiri dokumen SMKK yang telah dilakukan oleh BPJN Riau.

Tidak hanya itu, pada tanggal 25-27 November 2023, BPJN Riau juga memberikan Pendampingan Teknis kepada Dinas PUPR se-Provinsi Riau yaitu pada 12 Dinas Kota/Kabupaten dan Dinas PUPR Provinsi Riau.

Pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan kunjungan lapangan pada Proyek Skyway Tengku Buwang Asmara di Kabupaten Siak, yang kini

menjadi ikon serta tujuan wisata di Kabupaten Siak dan Dinas PUPR Kabupaten Siak sebagai tuan rumah dalam kunjungan tersebut.

Peserta pendampingan teknis melakukan penilaian terkait penerapan SMKK pada proyek tersebut, memberi saran dan narasumber memberi rekomendasi agar penerapan SMKK dapat terus ditingkatkan. Peserta dari Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pendampingan teknis yang diinisiasi oleh BPJN Riau.

Pendampingan Teknis penerapan SMKK di Provinsi Riau merupakan salah satu upaya konkret dari pemerintah untuk mencetak SDM bidang konstruksi yang kompeten dalam melaksanakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja. Dengan dukungan SDM yang andal dalam pelaksanaan SMKK, kita bisa berharap angka kecelakaan kerja di proyek-proyek konstruksi akan berkurang dan dapat mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.



Pengunjung menikmati Jembatan *Skyway* Tengku Buwang Asmara di Kabupaten Siak.

Jembatan Kaca *Skywalk* Tengku Buwang Asmara

Jembatan kaca *skywalk* Tengku Buwang Asmara merupakan salah satu destinasi wisata kekinian bagi wisatawan yang menyisir tepian Sungai Siak di Kampung Tengah, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Oleh: Wahyu Apriandy

Pekanbaru, Balai Riau — Keberadaan *Skywalk* yang berseberangan dengan pemandangan Kota Siak Sri Indrapura ini memang sangat istimewa. Jembatan ini juga berhadapan dengan Istana Siak sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Tak hanya pemandangan Istana Siak, barisan objek wisata di tepian sungai Siak pun menambah daya tarik jembatan kaca.

Nama *Skywalk* diambil dari nama Sultan Siak kedua, yakni Tengku Buwang Asmara. Lokasinya berdekatan dengan destinasi wisata peninggalan sejarah Sultan Siak, seperti Istana Siak, Mesjid Sultan Syahbudin, Tangsi Belanda, makam Sultan Siak, makam para penasihat Sultan.

Jembatan Kaca ini membentang sepanjang 1.076 meter, dimulai dari rumah Datuk Pesisir hingga museum Tangsi Belanda. Sebagian konstruksi *Skywalk* berupa kaca *tempered* 12 milimeter, sepanjang 50 meter dan bisa dilalui wisatawan. Jarak antara

kaca *tempered* dengan permukaan air pasang Sungai Siak sekitar 12 meter. Tentunya, keberadaan kaca itu menjadi daya tarik tersendiri di *Skywalk* Tengku

”

**Dancing light itu
tentunya menjadi
spot baru yang
instagramable
dengan latar
belakang Istana
Siak dan Turap
Singapura di
seberang *Skywalk*.**

Buwang Asmara. Biaya pembangunan *Skywalk* Tengku Buwang Asmara diperkirakan mencapai Rp 81,4 miliar.

Keindahan panorama jembatan pada siang hari menghiasi seberang Kota Siak dan di malam hari lampu neon yang menghiasi *Skywalk* menjadi daya tarik tersendiri pada objek wisata terbaru ini.

Dancing light atau lampu menari di tengah-tengah *Skywalk* menambah kecantikan jembatan kaca di malam hari. *Dancing light* itu tentunya menjadi spot baru yang *instagramable* dengan latar belakang Istana Siak dan Turap Singapura di seberang *Skywalk*.

Pengunjung hanya bisa berjalan satu arah, pintu masuk dari rumah Datuk Pesisir, dan keluar dari pintu dekat Tangsi Belanda.

Objek wisata ini bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam 25 menit, dengan jarak tempuh 105 km dari Pekanbaru menuju kota Siak Sri Indrapura.



Spot Jembatan *Skyway*
Tengku Buwang Asmara.

Aksi Daerah BPJN Riau Memperingati Hari Jalan 2023

Fungsi jalan sebagai sarana mobilitas manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya maka pembangunan infrastruktur menjadi garda depan dalam pembangunan bangsa. Dengan infrastruktur, jalan salah satunya, ekonomi diharapkan semakin merata dan meningkat.

Oleh: Mitra Herlinda

Pekanbaru, Balai Riau — Hari Jalan yang diperingati setiap tanggal 20 Desember merupakan momen yang bisa dimanfaatkan untuk refleksi terhadap kinerja semua pihak dalam penyelenggaraan jalan. Perayaan Hari Jalan yang ditetapkan 20 Desember tersebut atas rekomendasi dari

Direktorat Jenderal Bina Marga pada webinar Ilmiah Nasional di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur pada 20 Desember 2020 lalu, karena bertepatan dengan momentum tersambungunya Jalan Tol Trans Jawa.

BPJN Riau melaksanakan beberapa

rangkaian kegiatan Aksi Daerah dalam rangka memperingati Hari Jalan 2023, yaitu kegiatan pembersihan jalan dan jembatan yang dilaksanakan pada 4 Desember 2023 di Jembatan Sei Aur Kuning di paket Sp. Marpoyan - Batas Kuantan Singingi ruas PPK 2.5 Provinsi Riau. Kegiatan tersebut melibatkan



Tim BPJN Riau melaksanakan kegiatan pembersihan jalan dan jembatan dalam rangka memperingati Hari Jalan Nasional 2023.

stakeholder setempat, di antaranya Camat Perhentian Raja dan Kepala Desa Kampung Pinang beserta tim.

Tim dari BPJN Riau terdiri dari para Pejabat Struktural Balai, Kepala Satuan Kerja Wilayah Provinsi Riau, Pejabat Pembuat Komitmen beserta staf dan juga tim dari Paguyuban BPJN Riau. PPK 2.5 Provinsi Riau Made Paus, ST, mengungkapkan harapannya terhadap kegiatan ini agar bisa berlangsung di setiap tahunnya dikarenakan kegiatan ini sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat setempat dan pengguna jalan.

Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah penanaman pohon bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di paket ruas Bts. Kampar - Bangkinang pada PPK 1.4 Provinsi Riau, dilanjutkan penanaman di setiap ruas penanganan BPJN Riau dengan total bibit pohon yang ditanam adalah 130 bibit dengan beragam jenis, seperti Mahoni, Pinus, Ketapang Kencana, Pucuk Merah, Glodokan, Trembesi, dan Matoa. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan penanaman pohon bersama selain memperingati Hari Jalan 2023, juga untuk menciptakan lingkungan infrastruktur yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Kegiatan selanjutnya adalah Bina Marga Goes To My School, yang dilaksanakan di SD Negeri 6 Pekanbaru. Dengan tema "Mengenal Lebih Dekat Ditjen Bina Marga" tujuannya sebagai upaya penyebaran informasi terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR, khususnya Bina Marga kepada Masyarakat terutama kepada siswa/siswi Sekolah Dasar (SD).

Dengan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan aksi daerah di setiap tahunnya, BPJN Riau beserta seluruh pegawai dapat lebih bersemangat dalam mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas, berestetika dan lebih berwawasan lingkungan.



Kegiatan penanaman pohon bersama Kabalai dan Ketua Paguyuban BPJN Riau.



Murid SD Negeri 6 Pekanbaru yang mengikuti acara Bina Marga "Go To My School".

Semarak Hari Bakti PUPR Ke-78 di BPJN Riau

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial dan pertandingan olahraga dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) Ke-78 tahun 2023.

Oleh: Roni Irman Tua Turnip



Pekanbaru, Balai Riau — Harbak PU yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2023 merupakan kenangan pertempuran yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1945 di Gedung Departemen Van Verkeer En Waterstaat yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate Bandung. Waktu itu pasukan sekutu mengepung Gedung Sate yang dijaga dan dipertahankan oleh petugas dari Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum.

Petugas yang mempertahankan Gedung Sate tak mau menyerah begitu saja. Mereka melakukan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk mempertahankan kantor itu. Akibat dari pertempuran tersebut, 7 orang pegawai Pekerjaan Umum (PU) harus gugur hingga akhirnya nama mereka dikenang sebagai Pahlawan Sapta Taruna.

Peristiwa itu menjadi momen sejarah Pekerjaan Umum Indonesia



Kasatker PJN II Bapak Herison Menjerang Sedang melakukan pukulan pada pertandingan turnamen gateball Hari Bakti PUPR melawan tim BPPW Riau.

dari masa ke masa dan akan terus dikenang dengan peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum. Perjuangan dan pengabdian para Pahlawan Sapta Taruna, yang menjadi inspirasi bagi insan PU masa kini dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia dalam mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.

Pada peringatan Harbak PUPR Ke-78 BPJN Riau menyelenggarakan

beberapa kegiatan, seperti aksi sosial donor darah, PUPR peduli, dan juga pertandingan tenis meja, badminton, *gateball*, futsal, dan gerak jalan santai. Sebagai puncak peringatan Harbak dilaksanakan upacara peringatan bersama 5 unit organisasi di lingkungan Kementerian PU yang kini berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam kegiatan aksi sosial donor darah dilakukan bersama 5 unit



Kepala BPJN Riau Bapak Ir.T.Yuliansyah,M.T.selaku Pembina upacara Harbak PUPR ke 78 sedang membacakan pidato arahan dari Menteri PUPR.



Tim tenis meja BPJN Riau di pertandingan final ganda putra melawan tim BPPW Riau, di mana BPJN Riau keluar sebagai pemenang dan menjuarai turnamen tenis meja Harbak PUPR ke 78 antar unor balai di Provinsi Riau.



Foto Bersama Tim futsal Balai dan Satker sebelum pertandingan Turnamen Futsal di lingkungan BPJN Riau dalam rangka Hari Bakti PUPR yang ke 78.



Paguyuban BPJN Riau berpose bersama Kepala BPJN Riau serta para staff yang menerima tali kasih PUPR Peduli.

organisasi Kementerian PUPR Provinsi Riau. Seluruh insan PUPR, baik dari pejabat dan staf turut ambil bagian dalam aksi sosial ini, begitu juga dengan ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Paguyuban. Di internal BPJN Riau juga diadakan acara PUPR Peduli dengan memberikan tali kasih kepada Staf Karyawan Pendukung dan Pensiunan.

Beberapa pertandingan olahraga juga turut diselenggarakan, baik dalam internal BPJN Riau maupun antarunit organisasi Balai-balai di Riau. Semangat perjuangan dan pantang menyerah dalam meraih kemenangan menjadi dasar dalam kegiatan ini dan tentunya tetap menjunjung tinggi sportivitas.

BPJN Riau sebagai bagian dari insan PUPR juga selalu berusaha membangun infrastruktur terbaik di Provinsi Riau dengan meningkatkan mutu dan kualitas. Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah terus dilakukan setiap tahun. Kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat menjadi modal semangat dalam membangun negeri. Selamat Hari Bakti PUPR Ke-78. PUPR Sigap Membangun Negeri.



Kunjungan ke *Controlling Room Batching Plant*.

Pemeriksaan Kinerja Peralatan *Batching Plant* dan Mutu Bahan Campuran Beton

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) menyelenggarakan *Workshop Pemeriksaan Kinerja Peralatan Batching Plant* dan Mutu Bahan Campuran Beton pada tanggal 14-15 September 2023, sebagai upaya memberikan pemahaman dan pendampingan kepada Satker dan PPK terkait proses pemeriksaan kinerja peralatan dan pengendalian mutu di lokasi dan lapangan.

Pekanbaru, Balai Riau — BPJN Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tanggung jawab melaksanakan preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan. Salah satu fungsi yang diemban adalah sertifikasi laik operasi mesin pencampur *asphalt mixing plant* (AMP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan *workshop* dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada unsur BPJN Riau, yaitu Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga peserta memahami proses pemeriksaan kinerja peralatan *batching plant* dan pengendalian mutu campuran beton. Tujuan utama kegiatan ini adalah pemenuhan fungsi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dalam hal sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal dan *batching plant*.

Workshop dilaksanakan pada tanggal 14-15 September 2023 di The

Zuri Hotel Pekanbaru, serta kunjungan lapangan ke *Batching Plant* PT Riau Mas Bersaudara pada 14 September 2023. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 75 peserta dari unsur Balai, Satker, dan PPK di lingkungan BPJN Riau serta SKPD - TP Provinsi Riau.

Pemateri utama Ir Roestaman, MSc, membawakan materi SOP Pemeriksaan *Batching Plant* dan Pengawasan Mutu Campuran Beton, yang dipandu moderator Aidil Syahrul, ST.

Workshop berlangsung selama 2 hari dengan rangkaian acara meliputi registrasi peserta, pembukaan, sambutan dan arahan, kunjungan lapangan, ishome, materi utama, serta penutupan.

Pelaksanaan kegiatan

Hari pertama pelaksanaan *workshop* diisi dengan kunjungan lapangan ke *Batching Plant* PT Riau Mas Bersaudara, yang dilengkapi dengan materi pertama oleh Roestaman. Dalam kunjungan lapangan tersebut, peserta dibagi menjadi 2 kelompok,

di mana masing-masing kelompok melakukan peninjauan ke laboratorium dan pengamatan di ruang operator *Batching Plant*.

Di laboratorium terdapat kolam perendaman sampel beton, alat *capping* beton, serta pengujian kuat tekan beton kubus dan beton silinder.

Pada ruang operator *Batching Plant*, operator memberi penjelasan mengenai bagaimana sistem mesin beroperasi serta dilakukan pengujian slump di lapangan.

Pengendalian mutu

Dalam suatu proyek konstruksi, penting untuk memahami bahwa keberhasilan atau kegagalan pekerjaan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama pemahaman dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat. Dalam paparan materinya, ia menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan untuk mencegah kegagalan konstruksi di lapangan, yaitu pertama kurangnya pemahaman SDM yang berujung pada kegagalan konstruksi. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan





Pemeriksaan Material Agregat Kasar dan *Slump Test*.

keterampilan menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman yang memadai dalam menangani tugas konstruksi.

Kedua, faktor kegagalan pekerjaan, meliputi kurangnya pengendalian mutu pelaksanaan, kurang pengetahuan dan pemahaman, rancangan dan pelaksanaan yang salah, serta situasi dan kondisi yang memaksa.

Ketiga, pengendalian mutu beton melibatkan berbagai kegiatan untuk mencapai mutu yang direncanakan. Komponen utama bahan beton meliputi semen, air, aggregate halus, agregat kasar, dan bahan additive.

Keempat, kriteria utama mutu beton, di antaranya workabilitas atau adukan beton segar harus mudah dikerjakan tanpa terjadi *bleeding* dan segregasi; Kekuatan. Beton setelah keras harus memiliki kekuatan minimum terhadap beban; Durabilitas. Beton harus dapat mempertahankan mutu kekuatan selama umur layanan.

Kelima, faktor-faktor pengaruh mutu beton, di antaranya faktor workabilitas beton meliputi jumlah air, tipe agregat, gradasi, kehalusan semen, bahan tambah, waktu, suhu penguapan, dan proses hidrasi.

Faktor kekuatan beton melibatkan faktor air semen, derajat kepadatan, umur beton, mutu dan kondisi bahan, serta Faktor durabilitas beton

mencakup kondisi lingkungan dan iklim, faktor air semen maksimum, kadar semen minimum, zat tertentu dalam beton, permeabilitas beton, dan perawatan beton.

Keenam, tahapan pengendalian mutu beton yang dimulai dengan seleksi material, *job mix design*, peralatan, penakaran bahan, pengadukan (*mixing*), pengangkutan, pengecoran, pemadatan (*compacting*), penyelesaian akhir (*finishing*), perawatan (*curing*).

Ketujuh, pengecekan mutu beton segar yang dilakukan dengan pengecekan temperatur adukan beton dengan termometer sederhana serta pengecekan homogenitas adukan dan konsistensi adukan dengan pengujian slump.

Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah pengendalian mutu tersebut, diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan konstruksi di lapangan. Peningkatan keterampilan SDM, pengawasan yang ketat, dan penerapan prosedur pengendalian mutu beton menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam setiap proyek konstruksi.

Menjamin kualitas beton

Dalam dunia konstruksi, penggunaan *Batching Plant* menjadi kunci utama dalam memastikan kualitas beton yang dihasilkan. Melalui

Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan *Batching Plant*, berbagai langkah dan prosedur telah ditetapkan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan optimal dan menghasilkan beton yang memenuhi standar mutu yang ditentukan. Berikut adalah pemaparan materi terkait SOP pemeriksaan *Batching Plant*, yaitu pertama keunggulan *Batching Plant* Beton, di antaranya dapat diproduksi dalam jumlah besar, dapat diangkut ke lokasi pengecoran dengan volume besar dan jarak jauh, memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, dan minimalisasi jumlah material yang terbuang.

Kedua, faktor yang mempengaruhi mutu beton, seperti *mix formula*, mutu dan kondisi material yang digunakan, proses produksi, penanganan agregat, agregat dengan ukuran berbeda harus dipisahkan penyimpanannya, penumpukan agregat dilakukan dengan lapisan horizontal atau sudut landai, pemeriksaan efektif pada tumpukan agregat untuk mencegah segregasi, dan agregat disiram air terus menerus atau paling tidak 12 jam sebelum digunakan.

Ketiga, penanganan semen, di antaranya pengujian ulang semen yang disimpan selama 4 bulan sebelum digunakan dan pengelompokkan semen jenis berbeda untuk mencegah

tertukar.

Keempat, penanganan Bahan substitusi semen dengan menempatkan bahan substitusi seperti *fly ash* dalam silo terpisah.

Kelima, penanganan air, di antaranya pastikan air selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tempat penyimpanan air terhindar dari panas matahari dan kontaminasi.

Keenam, penanganan *admixture*, di antaranya simpan *admixture* dalam wadah tertutup rapat, gunakan dispenser yang berbeda untuk tipe *admixture* yang berbeda, dan berikan informasi lengkap terkait tipe, dosis, masa berlaku, dan merek *admixture*.

Ketujuh, penimbangan di *batching plant*, di antaranya periksa kadar air agregat sebelum penimbangan, pastikan tidak ada material tersisa setelah penimbangan, dan perhatikan batas toleransi penimbangan.

Kedelapan, pencampuran, di antaranya operasikan *mixer* beton

sesuai petunjuk pabrik pembuat alat dan kecepatan pencampuran hingga 25 Rpm dapat menghasilkan campuran beton yang baik.

Kesembilan, pengisian truk pengangkut beton, yakni dengan membatasi pengisian beton dalam drum *truck mixer* sesuai kapasitas.

Kesepuluh, pengangkutan, di antaranya gunakan bahan tambah jenis *retarder* saat pencampuran di *batching plant* dan pastikan data hasil pengujian waktu ikat semen dan kemampuan *retarder*.

Kesebelas, ketentuan pemeriksaan kelaikan produksi, di antaranya pemeriksaan dilakukan berdasarkan tahapan, dari kondisi teknis hingga pemeriksaan kelaikan produksi dan kewenangan penetapan laik produksi dan laik operasi ditentukan oleh instansi terkait.

Keduabelas, pemeriksaan teknis dan pengujian peralatan, yakni dengan pemeriksaan dilakukan melalui 4

tahapan, dari kondisi mati hingga pengujian penuh sesuai *job mix design*.

Dengan mengikuti SOP pemeriksaan *Batching Plant* tersebut, diharapkan industri konstruksi dapat menghasilkan beton berkualitas tinggi yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Penerapan prosedur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya kegagalan atau cacat pada beton yang dihasilkan.

Workshop tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pemeriksaan kinerja peralatan *batching plant* dan mutu bahan campuran beton, tetapi juga merangsang inisiatif peserta untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif. Dengan memperhatikan hasil survei dan rekomendasi peserta, diharapkan kegiatan serupa dapat lebih dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi industri konstruksi di masa depan.



Pemaparan SOP Pemeriksaan *Batching Plant* serta Pengawasan Mutu Campuran Beton oleh Ir Roestaman, MSc.

Inklusi Digital untuk Kesejahteraan ASN dan Pelayanan Publik di Ibukota Negara Nusantara



Dr Alfa Adib Ash Shiddiqi

Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional
Provinsi Riau
Email: adibalfa@pu.go.id

Gambaran Umum

Pada era globalisasi dan transformasi digital, inklusi digital telah menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang berdaya dan berinovasi. Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan yang mengemban peran kritis dalam penyelenggaraan negara, tidak terlepas dari tantangan untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Inklusi digital yang mencakup akses universal terhadap teknologi informasi, pelatihan keterampilan digital, dan pemberdayaan melalui solusi teknologi, menjadi fondasi kunci dalam membentuk birokrasi yang adaptif dan pelayanan publik yang berkualitas. Latar belakang ini menunjukkan urgensi makalah ini dalam mengeksplorasi peran inklusi digital dalam meningkatkan kualitas hidup ASN, dan pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di IKN.

Pendahuluan

Seiring dengan percepatan transformasi digital, ASN dihadapkan pada tuntutan untuk memahami dan mengintegrasikan teknologi dalam tugas sehari-hari mereka. Pembahasan ini menjadi semakin penting mengingat bahwa inklusi digital bukan hanya tentang memberikan akses teknologi, tetapi juga tentang membekali ASN dengan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di era digital. Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan mendukung pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang

mendukung perkembangan ASN dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif di tengah kompleksitas dan dinamika IKN.

Konsep Inklusi Digital

Inklusi Digital merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, kelompok, dan komunitas memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, yang melibatkan penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografisnya, untuk memanfaatkan

potensi penuh dari teknologi informasi dan komunikasi.

Definisi inklusi digital atau *digital inclusion* mencakup lebih dari sekadar akses fisik ke perangkat dan internet, yang juga mencakup literasi digital, keterampilan teknologi, dan dukungan yang diperlukan agar seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat digital.

Digital inclusion bertujuan untuk mengatasi kesenjangan digital, yang dapat muncul karena perbedaan dalam akses, pengetahuan, atau pemahaman terhadap teknologi.



Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Meningkatkan kualitas hidup

Inklusi digital memerlukan berbagai jenis strategi untuk meningkatkan kualitas hidup ASN di IKN, yaitu pertama ketersediaan akses internet yang prima menjadi prasyarat awal yang fundamental, sehingga ASN dapat dengan mudah mengakses informasi penting, sumber daya *online*, dan platform kerja kolaboratif, meningkatkan konektivitas, dan efisiensi komunikasi di seluruh sektor birokrasi.

Kedua, pelatihan keterampilan digital merupakan komponen kunci dari inklusi digital. Program pelatihan dapat mencakup penggunaan perangkat lunak kantor, manajemen data, serta keamanan siber. Inisiatif tersebut bukan hanya meningkatkan efektivitas kinerja, tetapi juga dapat

memberdayakan para ASN untuk menghadapi tuntutan teknologi yang terus berkembang, membuka peluang peningkatan karier, dan kesejahteraan personal.

Ketiga, penerapan *e-learning* dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi pendidikan dan pengembangan keterampilan tanpa menghambat rutinitas kerja. ASN dapat mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam peningkatan kualifikasi dan pengetahuan.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup ASN. Implementasi AI dalam proses administrasi, seperti pengolahan dokumen otomatis dan *chatbot* untuk pertanyaan rutin, dapat mengurangi beban kerja administratif

dan memungkinkan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan kreatif.

Keempat, pelayanan publik digital memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup ASN dan pelayanan publik secara keseluruhan. Penerapan layanan publik digital, dapat mempermudah proses administratif, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan yang efisien dan responsif kepada masyarakat. Dengan demikian, penyatuan strategi inklusi digital dapat membentuk lingkungan yang positif untuk ASN berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat di IKN.

Beberapa ibu kota baru negara lain juga berinisiatif menerapkan strategi inklusi digital, seperti Nur-Sultan (Kazakhstan), Putrajaya (Malaysia),

Brasília (Brasil), Canberra (Australia), Islamabad (Pakistan), Cairo (Mesir), dan Sejong City (Korea Selatan).

Penerapan *e-learning*

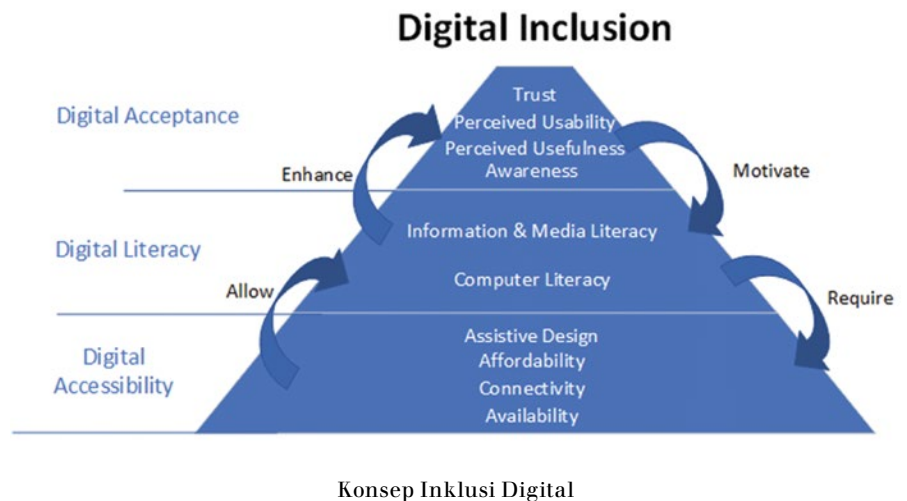
E-learning untuk ASN di IKN adalah salah satu inisiatif penting yang dapat membawa transformasi positif dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Inovasi tersebut menuntut gabungan antara manfaat teknologi digital dengan kebutuhan pelatihan. Beberapa poin penting terkait *e-learning* di IKN, yaitu pertama, *e-learning* memungkinkan ASN untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja, kapan saja, selama terhubung ke internet, yang dapat membantu menciptakan akses yang lebih universal terhadap pengetahuan dan pelatihan, terlepas dari lokasi fisik ataupun jadwal kerja yang padat.

Kedua, platform *e-learning* dapat memberikan pelatihan yang terukur dan tercatat. Pemerintah dapat memantau kemajuan belajar setiap ASN dan menilai efektivitas program pelatihan dengan lebih rinci, yang memungkinkan penyesuaian lebih cepat terhadap kebutuhan dan perkembangan individu.

E-learning memungkinkan adanya konten pembelajaran yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keterampilan individu. ASN dapat memilih materi yang paling relevan dengan tugas mereka atau memfokuskan pada pengembangan keterampilan tertentu.

Selain itu, Platform *e-learning* juga dapat mengintegrasikan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan, *virtual reality*, dan *augmented reality* untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran, membuat pelatihan menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif.

Dalam implementasinya *e-learning* dapat mengurangi biaya dan waktu terkait dengan pelatihan konvensional. ASN tidak perlu menghadiri



Konsep Inklusi Digital

sesi pelatihan di lokasi tertentu, menghemat biaya perjalanan dan waktu. Hal tersebut memungkinkan ASN untuk belajar sambil tetap menjalankan tugas sehari-hari mereka. *E-learning* mendukung pembelajaran berkelanjutan, yang berarti dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ASN sepanjang kariernya. Model pembelajaran tersebut mendukung adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan tugas yang berkembang. *E-learning* di IKN bukan hanya suatu inovasi dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, terampil, dan siap menghadapi dinamika zaman.

Kecerdasan Buatan

Implementasi kecerdasan buatan atau AI dalam proses administrasi pemerintahan membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja ASN. Salah satu keuntungan utama AI adalah efisiensi dalam pengolahan dokumen, seperti pengarsipan dan penyortiran dokumen dapat diotomatisasi, mengurangi beban kerja manual, dan membebaskan waktu ASN untuk tugas-tugas yang lebih penting.

Sistem tersebut mampu mengenali, mengklasifikasikan, dan mengekstrak

informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi serta meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Demikian halnya implementasi *chatbot* berbasis AI akan membawa peningkatan responsif terhadap pertanyaan rutin dari warga atau rekan kerja. *Chatbot* dapat memberikan solusi instan untuk pertanyaan umum, mengurangi waktu yang sebelumnya dihabiskan ASN untuk menjawab pertanyaan repetitif. Kecepatan dan akurasi respons dari *chatbot* dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kepuasan pengguna.

Dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang rutin, ASN dapat lebih fokus pada tugas-tugas kreatif dan strategis. Mereka dapat terlibat dalam pemikiran strategis, perencanaan kebijakan, dan inovasi, serta membantu meningkatkan kualitas dan relevansi keputusan yang diambil dalam lingkungan pemerintahan, yang memungkinkan ASN untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menghadapi tantangan kompleks di dunia pemerintahan.

Penerapan AI dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam administrasi pemerintahan untuk mengurangi potensi *human error* (kesalahan manusia). Selain itu, Sistem AI juga dapat meningkatkan kualitas

data dan informasi yang dikelola oleh ASN. Hal itu memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang akurat dan efektif.

Secara keseluruhan, implementasi AI dalam administrasi pemerintahan adalah langkah progresif untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kreativitas ASN. Kemudian, membuka potensi baru untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan membantu ASN untuk lebih berfokus pada tugas-tugas yang memiliki dampak strategis dan inovatif.

Pelayanan publik digital

Pelayanan Publik Digital yang merujuk pada penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang efisien, cepat, dan mudah diakses, melalui penggunaan platform *online*, aplikasi seluler, dan solusi teknologi lainnya untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga.

Beberapa contoh konkret dari pelayanan publik digital, yaitu pertama Pendaftaran Pelayanan Publik *Online*, seperti pendaftaran untuk layanan pendidikan, perpajakan, atau pelayanan kesehatan, dapat dilakukan secara *online*. Warga dapat mengisi formulir dan mengajukan dokumen melalui portal pemerintah digital tanpa harus mengunjungi kantor fisik.

Kedua, Pembayaran Pajak *Online*. Platform pembayaran pajak *online*, di mana warga dapat membayar pajak properti, pajak kendaraan, atau pajak lainnya tanpa perlu pergi ke kantor pajak sangat penting. Ini memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi proses pembayaran.

Ketiga, Fasilitas pengaduan *online*. Warga dapat mengajukan pengaduan atau memberikan saran masukan terkait layanan pemerintah melalui platform *online*. Sistem ini

memungkinkan pemerintah untuk merespons masukan dari masyarakat secara cepat dan menyeluruh.

Keempat, Aplikasi Kesehatan Digital. Pemerintah dapat menyediakan aplikasi kesehatan digital yang memungkinkan warga mengakses informasi kesehatan, berkonsultasi dengan dokter, atau bahkan mengakses hasil pemeriksaan medis secara *online*. Hal ini mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Kelima, Portal Informasi Publik. Pemerintah menyediakan portal informasi publik yang berisi data dan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan proyek-proyek pemerintah. Warga dapat mengakses informasi ini secara transparan dan terbuka.

Keenam, *Chatbot* pelayanan masyarakat. Penggunaan *chatbot* untuk layanan masyarakat memungkinkan warga mendapatkan jawaban cepat terkait pertanyaan umum. *Chatbot* dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, perizinan, dan kesehatan.

Ketujuh, Pendaftaran Program Sosial secara *online*. Warga yang memenuhi syarat untuk program sosial dapat mendaftar secara *online* melalui platform pemerintah digital. Ini memangkas waktu proses dan meningkatkan aksesibilitas program-program tersebut.

Pelayanan publik digital membawa berbagai keuntungan, termasuk efisiensi waktu, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui integrasi teknologi, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tantangan

Implementasi inklusi digital di IKN sebagai kota yang baru terbangun, menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan transformasi digital yang

merata dan inklusif.

Tantangan utama penerapan infrastruktur digital, di antaranya pertama pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet yang kuat dan merata di seluruh wilayah kota baru merupakan prasyarat esensial untuk memastikan akses digital yang adil bagi seluruh penduduk.

Kedua, pendidikan dan literasi digital menjadi faktor kunci dalam menjamin inklusi digital. Tantangan tersebut melibatkan peningkatan kualitas pendidikan yang memasukkan kurikulum digital dan program pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat serta akan memastikan bahwa penduduk IKN memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi digital.

Ketiga, kesenjangan ekonomi dan sosial dapat menjadi tantangan serius. Meskipun inklusi digital dapat meningkatkan akses ke peluang ekonomi, tetapi risiko kesenjangan digital tetap ada. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, serta dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi digital dengan setara.

Keempat, keamanan siber menjadi isu penting dalam konteks inklusi digital. Perlu ada langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif masyarakat. Sistem keamanan siber yang handal akan membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan dapat diandalkan.

Kelima, partisipasi masyarakat dalam proses inklusi digital perlu ditingkatkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi inisiatif inklusi digital. Masyarakat yang berpartisipasi aktif akan lebih mungkin merespons positif terhadap perubahan digital dan lebih mudah

mengatasi potensi hambatan untuk mengatasi setiap tantangan di IKN, sehingga dapat mencapai inklusi digital yang seimbang dan berkelanjutan, yang akan membawa dampak positif terhadap pelayanan publik, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Langkah strategis

Langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan inklusi digital sebagai pijakan utama dalam merancang birokrasi yang adaptif dan pelayanan publik yang lebih baik di IKN, yaitu pertama Integrasi Keterampilan Digital dalam Pendidikan Formal. Menyelaraskan kurikulum pendidikan formal dengan keterampilan digital. Ini melibatkan pengintegrasian pembelajaran keterampilan digital, literasi teknologi dan penggunaan alat-alat digital dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.

Kedua, Program Pelatihan dan Sertifikasi Digital untuk ASN. Mengembangkan program pelatihan digital khusus untuk ASN. Program ini dapat mencakup sertifikasi digital yang mengukur tingkat keterampilan dan pemahaman terhadap teknologi digital yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas ASN.

Ketiga, Peningkatan Akses Infrastruktur Digital. Memastikan bahwa seluruh wilayah IKN memiliki akses yang prima terhadap infrastruktur digital, termasuk jaringan internet yang cepat dan dapat diandalkan, seperti pengembangan zona *Wi-Fi* publik dan perluasan jaringan *broadband*.

Keempat, Inisiatif Kemitraan dengan Sektor Swasta. Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan pelaku industri swasta. Kerja sama tersebut dapat mencakup penyediaan teknologi terbaru, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan keuangan untuk proyek-proyek inklusi digital.

Kelima, Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik yang *User Friendly*.



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau pembangunan di IKN.

Mengembangkan aplikasi pelayanan publik yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Aplikasi harus dirancang dengan memperhatikan keberagaman pengguna, termasuk mereka yang mungkin belum memiliki tingkat literasi digital yang tinggi.

Keenam, Penyuluhan dan Sosialisasi Inklusi Digital. Melakukan sosialisasi penyuluhan dan edukasi publik tentang pentingnya inklusi digital, seperti *workshop*, seminar, dan program edukasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan manfaat teknologi digital.

Ketujuh, Peningkatan Keamanan dan Privasi Digital. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat dan ASN. Pendidikan terkait keamanan digital juga harus menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan literasi digital.

Kedelapan, Membangun Platform Informasi dan Konsultasi untuk Masyarakat. Membangun platform interaktif yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan kritikan terkait pelayanan publik digital. Ini dapat menjadi wadah untuk berbagai kelompok masyarakat berpartisipasi dalam merancang solusi yang lebih inklusif.

Kesembilan, Penguatan Kolaborasi Antar-Instansi. Mendorong kolaborasi antar-instansi pemerintah yang terlibat dalam pelayanan publik. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi dapat memastikan implementasi langkah-langkah inklusi digital berjalan lancar dan merata.

Implementasi dari langkah strategis tersebut dapat membangun fondasi inklusi digital yang solid, menciptakan birokrasi yang responsif terhadap teknologi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Pengumpulan Data Profil Memanjang (Ketidakrataan IRI) Jalan Nasional di Provinsi Riau

Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR pasal 104, mengamanatkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau (BPJN Riau) menyelenggarakan fungsi penyiapan, pelaksanaan, pengolahan data, serta informasi jalan dan jembatan.

Oleh: Darmawi & Asri Awal Roza

Pekanbaru, Balai Riau—Pelaksanaan penyelenggaraan Survei Kondisi Jalan, Lereng, dan Jembatan di Provinsi Riau merupakan salah satu lingkup pekerjaan dari kegiatan pengumpulan data Profil Memanjang (ketidakrataan International Roughness Index atau IRI). Pengumpulan data yang dilakukan adalah kegiatan merekam, melaporkan, dan memproses data profil memanjang setiap lajur jalan dan menyajikannya dalam satuan meter atau km.

Ketidakrataan permukaan jalan menjadi salah satu faktor pelayanan perkerasan yang mempengaruhi kenyamanan (kualitas berkendara) pengemudi. Ketidakrataan permukaan suatu ruas jalan dapat dilihat berdasarkan nilai IRI.

IRI adalah besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan yang diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan per satuan panjang. Secara matematis, IRI adalah perbandingan antara kumulatif panjang jalan rusak atau berlubang (dalam

satuan meter) terhadap panjang jalan total (dalam satuan km), sehingga semakin besar nilai IRI, maka semakin buruk kondisi keadaan permukaan jalannya.

Adapun tujuan pengumpulan data profil memanjang (ketidakrataan) jaringan jalan dapat digunakan, yaitu memberikan gambaran umum kondisi jaringan jalan; mengembangkan model penurunan kondisi perkerasan; memberikan masukan dalam optimasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan; memberikan masukan untuk pemodelan dalam mengevaluasi efektivitas standar perencanaan perkerasan dan kebijakan pemeliharaan, serta menilai bagian biaya penyelenggaraan jalan dalam menunjang angkutan barang dan jasa.

Selanjutnya, kondisi keadaan permukaan suatu ruas perkerasan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Keadaan Jalan baik
Keadaan permukaan suatu ruas

perkerasan jalan yang mulus dan sangat mantap untuk dilalui.

- b. Keadaan Jalan sedang
Keadaan permukaan suatu ruas perkerasan jalan yang mulus namun ada sedikit gelombang tetapi tidak ada lubang.
- c. Keadaan Jalan rusak ringan
Keadaan permukaan suatu ruas perkerasan jalan yang agak rusak pada permukaan aspal nya dan telah dilakukan penambalan pada lubang yang ada pada suatu ruas perkerasan jalan tersebut.
- d. Keadaan Jalan rusak berat
Keadaan permukaan suatu ruas perkerasan jalan yang telah banyak mengalami kerusakan, adanya lubang, adanya gelombang, adanya retak, bahkan kerusakannya telah mencapai lapis fondasi.

Ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sering disebut dengan jalan mantap, sedangkan ruas jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat

Nilai IRI	Kondisi	
< 4	Baik	Mantap
4-8	Sedang	
8-12	Rusak Ringan	Tidak Mantap
> 12	Rusak Berat	

Data korelasi nilai IRI dan kondisi jalan.

disebut dengan jalan tidak mantap.

Pengumpulan data profil memanjang jalan nasional Provinsi Riau pada Tahun Anggaran (TA) 2023 menggunakan alat Road Measurement Data Acquisition System (ROMDAS).

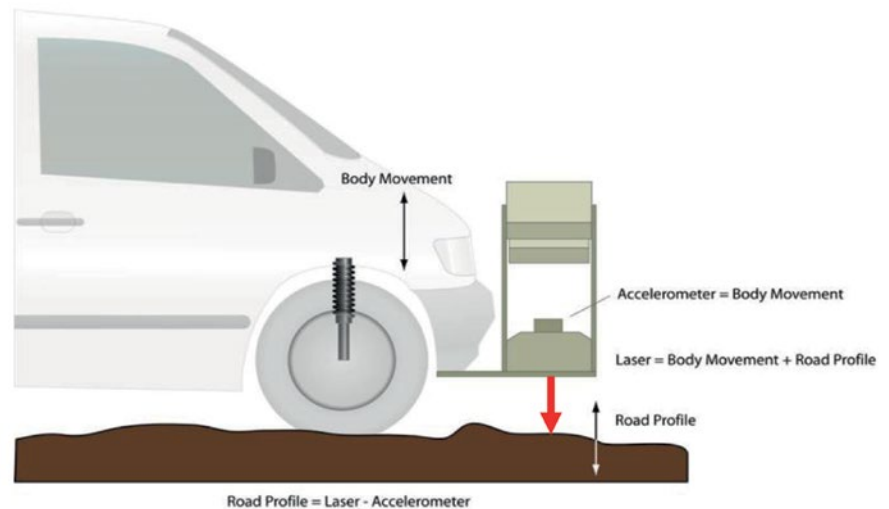
ROMDAS adalah sistem yang dapat mengintegrasikan beberapa peralatan sensor yang spesifik untuk mendapatkan data karakteristik komponen jalan raya dan mengumpulkannya sekaligus dalam tingkatan jaringan, yang dirancang secara modular untuk memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan. Selain itu, juga dapat dipasang ataupun disesuaikan dengan berbagai kendaraan. Peralatan pengukur ketidakrataan jalan tersebut termasuk ke dalam peralatan pengukur kelas I.



Alat Sistem ROMDAS

Alat Sistem ROMDAS

Sistem ROMDAS memiliki dua komponen utama yang digunakan dalam proses pengukuran, termasuk pengukuran indeks ketidakrataan, yaitu pertama peralatan pengumpulan data (*acquisition data package*) yang



Laser Profilometer pada sistem ROMDAS.

merupakan perangkat keras modular dan modul perangkat lunak yang terpasang pada kendaraan survei.

Kedua, perangkat untuk mengamati dan mengolah data hasil pengukuran (*processing toolkit* dan *data viewer*).

Kedua komponen tersebut adalah perangkat lunak yang dapat memfasilitasi pengamatan pasca-survei dan pengukuran, mengatur, mengolah, dan membuat pelaporan data yang telah dikumpulkan menggunakan kendaraan survei.

Bagian-bagian sistem peralatan pada *acquisition data package* yang terdapat pada sistem ROMDAS, yaitu pertama *Laser Profiler* adalah modul tambahan untuk merekam profil jalan longitudinal dengan akurasi tinggi. Alat ini menggunakan kombinasi sensor laser dan akselerometer untuk mengukur profil jalan pada kecepatan jalan raya. Profil mentah kemudian dianalisis untuk menghitung IRI dan/atau makro-tekstur (MPD) sesuai dengan standar internasional.

Kedua, *Video Logging* (ROW Camera). Kamera ROW menangkap pemandangan yang berfokus pada aset dan inventaris jalan, termasuk rambu, marka trotoar, trotoar, dan aset lingkungan. Kamera tampilan perkerasan merekam gambar



Video Logging (ROW Camera) pada sistem ROMDAS.

perkerasan beresolusi tinggi untuk mengidentifikasi retakan, lubang, dan cacat lain yang terlihat. Fitur seperti jarak yang ditentukan pengguna, tampilan gambar yang dapat disesuaikan yang menampilkan informasi mendetail tentang survei, referensi *Global Positioning System* (GPS), dan keluaran foto berformat *Joint Photographic Experts Group* (JPEG).

Ketiga, GPS atau *Global Navigation*



Satellite System (GNSS).

Keempat, *High Resolution Distance Measuring Instrument (HR-DMI)*. Instrumen pengukuran jarak resolusi tinggi digunakan dalam proyek yang memerlukan pengukuran jarak yang sangat akurat ($<0,1$ meter).

Hasil survei

Survei Profil Memanjang jalan dilakukan terhadap 53 ruas jalan nasional di Provinsi Riau pada setiap lajur jalan sepanjang 1.257,70 km. Data harus direkam dan dilaporkan nilai IRI dalam meter atau km untuk setiap lajur lalu-lintas. Nilai ketidakrataan yang dilaporkan untuk setiap lajur adalah nilai rata-rata pembacaan pada sensor kiri dan sensor kanan. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan hasil kondisi jalan pada akhir TA 2023. Gambaran umum kondisi jaringan jalan nasional di Provinsi Riau sepanjang 1189,78 km dengan kondisi mantap atau sebesar 94,58% dari total ruas jalan. Dari data tersebut juga dapat memberikan masukan dalam optimasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan serta evaluasi dalam pencapaian kegiatan preservasi jalan.



GPS/GNSS dan HRDMI pada sistem ROMDAS.

Nama Provinsi	Panjang Survei (KM)	Total Kemantapan											
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
R I A U	1257,9	289,83	23,04	899,95	71,54	67,32	5,35	0,8	0,06	1189,78	94,58	68,12	5,42
TOTAL	1257,9	289,83	23,04	899,95	71,54	67,32	5,35	0,8	0,06	1189,78	94,58	68,12	5,42

Data hasil pengukuran yang didapatkan hasil kondisi jalan pada akhir TA 2023.



Satker PJN Wilayah I Prov. Riau

Rinaldi, ST, MEng
PPK 1.5

Rozaidil Ridwan, ST, MEng
PPK 1.1

Odra Rachmawati, ST, MT
PPK 1.2

Syamsurizal, ST, MT
PPK 1.4

Rudisman, ST
Pgs. Kasatker PJN 1 PPK 1.3

Kasatker P2JN
Provinsi Riau
Alfa Adib Ash Shiddiqi, ST, MSc

PPK Pengawasan
Sulis Nursyamsudin, ST, MT

PPK Perencanaan
Primawaty Silaen, ST, MT

Satker P2JN Prov. Riau



Satker PJN Wilayah II Prov. Riau



**Hermi
Ardani, ST**
PPK 2.2

**Ahmad Rivin
Damanik, ST**
PPK 2.1

**Sasri Rosyadi,
ST, MSc**
PPK 2.4

**Made Paus,
ST, MT**
PPK 2.5

Irfan Luthfi, ST
PPK 2.3

Herison Menjerang, ST, MT
Kasatker PJN II Provinsi Riau

Hervin Haikal, ST, MSc
PPK 2.6

Parlindungan Aruan, SSos
Bendahara



Zaiful Azmi, SKom
Pejabat SPM



Hery Sandy Daulay, ST
Kasatker SKPD

SKPD Prov. Riau

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU

Selamat
Hari Bakti PUPR ke-78
&
Hari Jalan 2023

